

LAPORAN BULAN MARET DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bulan MARET Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan bulan MARET 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode bulan MARET Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Laporan ini dibuat dan disusun untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program serta kegiatan yang disertai pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Bulan MARET Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2025

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
BAB II.....	6
RENCANA KINERJA OUTPUT/RO	6
BAB III.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
A. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	9
B. Monitoring Kegiatan Prioritas	10
BAB IV	57
PENUTUP	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia,

daging unggas dan cabai.

Oleh karena itu, sasaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 fokus dalam mencapai: (1) Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan; (2) Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan (3) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode bulan MARET 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

1.2 TUJUAN

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan MARET 2025.
- b. Melakukan Pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan MARET 2025

1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN LAPORAN

- a. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
- b. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
- c. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II

RENCANA KINERJA OUTPUT/RO

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Penetapan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Pada tahun 2025, mengacu pada DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga dengan mengampu sebanyak 6 (enam) klasifikasi rincian output (KRO) dan 6 (enam) Rincian Output (RO). Sebagai tindak lanjut pencaianan program/kegiatan tersebut, maka disusun rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan MARET tahun 2025 akan dilihat dari pencapaian output/RO, komponen dan sub komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA pada bulan MARET Tahun 2025. Pada bulan MARET tersebut ditargetkan sebesar 10%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Target Fisik dan Keuangan Bulan MARET Sesuai DIPA Revisi II Deputi
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan MARET 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 10% (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976.000	2 rekomendasi kebijakan	37.097.600	1
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	772.080.000	12 rekomendasi kebijakan	77.208.000	4
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954.000	6 rekomendasi kebijakan	59.995.400	1
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	969.585.000	6 kegiatan	96.958.500	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	343.898.000	1 Kegiatan	34.389.800	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	3.190.657.000	1 kegiatan	319.565.700	1
	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	257.680.000	6 NSPK	25.768.000	1

AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	38.400.000	10 NSPK	3.840.000	4
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	382.621.000	14 NSPK	38.262.100	1
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	900.000.000	50 Kelompok Masyarakat	90.000.000	15
		Gerakan Pangan Murah yang diaksanakan	1.220.000.000	1 Kelompok Masyarakat	122.000.000	1
		Kios Pangan yang dikembangkan	150.070.000	1 Kelompok Masyarakat	15.007.000	1
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423.000	4 Data	87.942.300	1
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	10.765.725.000	12 Data	1.076.572.500	4
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371.000	1 Data	16.237.100	1
BEC – Bantuan Produk	Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36.430.340.000	Kelompok Masyarakat	0	0

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan KRO dan Output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Realisasi keuangan pada bulan MARET Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan, KRO, RO, Komponen dan sub komponen dari masing-masing Direktorat lingkup kedeputian sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan MARET Sesuai DIPA Revisi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Target Bulan MARET 2025		Realisasi Bulan MARET 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan 10% (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	37.097.600	1	24.869.540	1
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	77.208.000	4	263.123.978	4
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	59.995.400	1	0	1
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev Dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	96.958.500	1	282.217.042	1

	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	34.389.800	1	249.861.165	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	319.065.700	1	964.752.371	1
AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	25.768.000	1	0	1
	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	3.840.000	4	18.500.000	3
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	38.262.100	1	0	1
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	90.000.000	15	39.386.750	15
		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	122.000.000	1	139.936.067	1
		Kios Pangan yang dikembangkan	15.007.000	1	22.800.000	1
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	87.942.300	1	23.770.663	1
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	1.076.572.500	4	756.429.294	1
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	16.237.100	1	0	0
BEC – Bantuan Produk	Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	3.643.034.000	0	0	0

Berdasarkan Laporan hasil realisasi fisik dan keuangan pada Ouput/RO dan komponen

lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan MARET tahun 2025 sebagaimana tabel di atas Realisasi anggaran per bulan MARET 2025 berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp2.785.646.870,- atau 4,85% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp57.433.780.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari rencana penarikan bulan MARET 2025, yaitu sebesar Rp2.100.344.000,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya reasisasi pada bulan Maret disebabkan karena adanya alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga mempengaruhi terhadap capaian realisasi. Selain itu, belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan perencanaan kegiatan tidak terjadwal secara rutin. Pada bulan Maret terdapat penambahan realisasi fisik dengan rincian, yaitu 6 RO Rekomendasi, 3 RO Koordinasi, 5 RO NSPK, Pangan Terdistribusi 15 Kelompok Masyarakat, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 2 RO Data dan Informasi. Rendah serapan anggaran perlu menjadi perhatian untuk perencanaan keuangan di masing-masing RO di bulan selanjutnya.

B. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil Monitoring Kegiatan prioritas lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan MARET 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, walaupun belum ada realisasi anggaran namun kegiatan fisik yang mendukung pencapaian kegiatan tetap diselenggarakan sebagai berikut:

a) Direktorat Ketersediaan Pangan

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Impor Daging Lembu Penugasan BUMN Pangan.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025 di Kantor Bapanas melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi impor penugasan daging lembu kepada BUMN yang telah ditetapkan tahap I hasil Rakortas tanggal 5 Februari 2025 sebagai dasar dilaksanakannya penambahan alokasi impor daging kerbau melalui penugasan kepada BUMN Pangan tahap II hasil Rakortas tanggal 12 Februari 2025.

Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Bidang Pangan, perwakilan Direktur Kesmavet Kementan, perwakilan Direktur Impor Kemendag, perwakilan Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW, perwakilan Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW, Direktur Komersial ID Food, Direktur Operasional PT Berdikari, dan Direktur Operasi PT PPI. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Risalah Rakortas Bidang Pangan tanggal 12 Februari 2025 menyepakati penambahan alokasi impor penugasan daging kerbau tahap II sebesar 100.000 Ton kepada BUMN, dengan catatan memperhatikan optimalisasi realisasi penugasan tahap I hingga Idul Fitri. Penambahan alokasi impor reguler daging lembu sebesar 100.000 ton untuk 86 pelaku usaha umum sesuai data sebelumnya, dengan catatan diberi waktu realisasi sesuai dengan kebutuhan nasional pada periode HBKN 2025.
- b) Pantauan harga pangan Bapanas melalui Panel Harga Pangan per 2 Maret 2025, harga daging kerbau beku berkisar Rp 105.000 per Kg atau di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp 80.000 per Kg.
- c) Berdasarkan data Ditjen PKH, stok daging lembu di importir dan Bulog per tanggal 28 Februari 2025 sebesar 38.837 Ton.
- d) Realisasi impor daging lembu secara keseluruhan dari Sinas NK per tanggal 3 Maret 2025 sebesar 5.061 Ton (1,77% dari PI terbit). Realisasi impor penugasan daging sapi sebesar 717 (0,72% dari PI terbit), sedangkan realisasi impor penugasan daging kerbau masih nol.
- e) PT. Berdikari sudah melakukan PO daging sapi sebanyak 267 kontainer atau 6.775 Ton, dimana sebanyak 29 kontainer atau 719 Ton telah masuk ke gudang distributor di Cikarang, sedangkan sisanya 238 kontainer atau 5.950 Ton akan masuk di bulan Maret. Untuk daging kerbau, PT Berdikari sudah melakukan PO sebanyak 24 kontainer atau 672 Ton pada akhir Februari dan 97 kontainer atau 2.716 Ton pada awal Maret dan akan masuk di pertengahan Maret.
- f) PT. PPI minggu ini akan melakukan PO daging sapi sebanyak 2.000 Ton dan daging kerbau sebanyak 4.000 Ton dengan estimasi kedatangan daging sapi pada akhir Maret dan daging kerbau pada awal April 2025.
- g) PT. Berdikari dan PT. PPI diharapkan dapat membuat timeline rencana realisasi impor penugasan daging sapi dan daging kerbau sampai akhir Desember 2025, baik penugasan tahap I dan penambahan tahap II. Terkait dengan penambahan penugasan tahap 2, ID Food menyampaikan bahwa penambahan penugasan tahap 2 kemungkinan baru bisa dilakukan pada bulan Juni.
- h) PT. Berdikari dan PT. PPI diharapkan dapat mengeluarkan stok daging kerbau yang sudah dialokasikan sebanyak 9.000 Ton untuk OP agar dapat menstabilkan harga daging kerbau di masyarakat sampai mendekati HAP.
- i) Kemenko Pangan menyampaikan realisasi impor penugasan daging kerbau perlu didorong untuk stabilisasi harga di dalam negeri melihat harga saat ini masih jauh di atas HAP. Terkait hal tersebut, Kemenko Pangan akan melakukan evaluasi

realisasi impor penugasan daging lembu setiap minggu sampai menjelang hari raya Idul Fitri 2025.

- j) Direktorat Kesmavet Kementan mengharapkan laporan realisasi impor penugasan dapat dirinci berdasarkan negara asal, khususnya daging sapi dari Brazil, karena data tersebut akan disampaikan ke Kemenko Bidang Perekonomian.
- k) Sistem monitoring realisasi dan distribusi daging impor penugasan BUMN yang dikembangkan ID Food diharapkan dapat segera diselesaikan dan menjadi instrumen untuk memantau distribusi daging lembu impor penugasan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga daging lembu di masyarakat
- l) Rencana Tindak Lanjut : PT. Berdikari dan PT. PPI diharapkan segera mengirimkan rencana realisasi impor daging lembu penugasan tahun 2025 dan melakukan realisasi impor sesuai dengan target dan timeline yang sudah dibuat.

Dokumentasi:



2. Pemantauan Lapangan Ketersediaan Daging Lembu di Gudang BUMN Pangan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025 di Jakarta Utara dan Cikarang. Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi realisasi, distribusi, dan stok daging lembu di gudang BUMN Pangan. Pemantauan dilakukan di Gudang PT. Berdikari, PT. PPI, dan Perum Bulog yang dilaksanakan oleh Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing BUMN Pangan. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) PT. Berdikari memiliki gudang di daerah Yos Sudarso dengan kapasitas 40 Ton. Stok di gudang saat ini 16,9 Ton (4,6 Ton daging sapi dan 12,3 Ton daging kerbau) yang merupakan realisasi dari PI tahun 2024. Stok tersebut akan digunakan untuk Operasi Pasar (OP) di wilayah Jakarta dan Bogor.

- b) Selain untuk OP, stok di gudang PT. Berdikari juga di distribusikan ke Horeka di wilayah Jabodetabek.
- c) Kendala PT. Berdikari dalam mendukung OP adalah proses penjualan yang dapat dilakukan melalui sistem kantor POS, jika sistem mengalami gangguan maka tidak bisa melakukan penjualan.
- d) PT. PPI memiliki gudang di daerah Kelapa Gading dengan kapasitas 650 Ton. Stok di gudang saat ini 2.437 Kg yang merupakan realisasi dari PI tahun 2024 dan dialokasikan untuk OP selama bulan Ramadhan dan disalurkan melalui kantor POS dan gerai UPT Kementan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang.
- e) Kendala yang dihadapi PT. PPI dalam impor daging lembu terutama dalam mendukung OP adalah harga di supplier dan kurs tinggi, permintaan yang tinggi dari negara lain, dan permintaan shipment di akhir tahun.
- f) Perum Bulog memiliki proses bisnis untuk pengadaan daging kerbau dengan skema komersial yaitu Perum Bulog membeli daging kerbau dari importir dan bermitra dengan PT. Estika Tata Tiara.
- g) Stok daging kerbau Perum Bulog saat ini sebesar 9.700 Ton yang disimpan di Gudang PT. Suri Nusantara Jaya di Cikarang.
- h) Perum Bulog menjual daging kerbau ke distributor yang ada di wilayah Jakarta dan juga menyalurkan ke Kanwil Bulog di seluruh Indonesia. Dan menjelang HBKN permintaan daging kerbau meningkat hingga 100 Ton/minggu.
- i) Rencana Tindak Lanjut: PT. Berdikari dan PT. PPI akan merealisasikan penugasan impor daging lembu tahun 2025 sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. PT. PPI akan menyampaikan update progress realisasi impor penugasan lembu tiap minggu di hari kamis.

Dokumentasi:



3. Pemantauan Lapangan Ketersediaan Daging Lembu di Gudang BUMN Pangan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025 di Jakarta Utara dan Cikarang. Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi realisasi, distribusi, dan stok daging lembu di gudang BUMN Pangan. Pemantauan dilakukan di Gudang PT. Berdikari, PT. PPI, dan Perum Bulog yang dilaksanakan oleh Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing BUMN Pangan. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) PT. Berdikari memiliki gudang di daerah Yos Sudarso dengan kapasitas 40 Ton. Stok di gudang saat ini 16,9 Ton (4,6 Ton daging sapi dan 12,3 Ton daging kerbau) yang merupakan realisasi dari PI tahun 2024. Stok tersebut akan digunakan untuk Operasi Pasar (OP) di wilayah Jakarta dan Bogor. Selain untuk OP, stok di gudang PT. Berdikari juga di distribusikan ke Horeka di wilayah Jabodetabek.
 - b) PT. PPI memiliki gudang di daerah Kelapa Gading dengan kapasitas 650 Ton. Stok di gudang saat ini 2.437 Kg daging kerbau yang merupakan realisasi dari PI tahun 2024 dan dialokasikan untuk OP selama bulan Ramadhan dan disalurkan melalui kantor POS dan gerai UPT Kementan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang.
 - c) Stok daging kerbau Perum Bulog saat ini sebesar 9.700 Ton yang disimpan di Gudang PT. Suri Nusantara Jaya di Cikarang. Perum Bulog memiliki proses bisnis untuk pengadaan daging kerbau dengan skema komersial yaitu Perum Bulog membeli daging kerbau dari importir dan bermitra dengan PT. Estika Tata Tiara. Perum Bulog menjual daging kerbau ke distributor yang ada di wilayah Jakarta dan juga menyalurkan ke Kanwil Bulog di seluruh Indonesia. Menjelang HBKN permintaan daging kerbau meningkat hingga 100 Ton/minggu.
 - d) Rencana Tindak Lanjut: PT. Berdikari dan PT. PPI akan merealisasikan penugasan impor daging lembu tahun 2025 sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. PT. PPI dan PT. Berdikari akan menyampaikan update progress realisasi impor penugasan lembu tiap minggu di hari kamis.
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Stabilisasi Harga Daging Lembu di Pasar Tradisional
- Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi antara Importir BUMN dan Asosiasi Pedagang Daging terkait pendistribusian daging lembu impor ke para pelaku/pedagang dalam rangka menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga pada Idul Fitri 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi KSP Bapanas dan dihadiri oleh Direktur KP, perwakilan PT Berdikari, perwakilan PT PPI, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), dan Ketua Umum Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPD), serta perwakilan dari PT Suri. Poin-poin Hasil Pertemuan:
- a) Latar belakang dilakukannya rapat ini yaitu saluran daging lembu impor yang masih belum optimal untuk menjaga ketersediaan/stok dan kestabilan harga

daging lembu ke pelaku usaha/pedagang.

- b) Perwakilan asosiasi pedagang daging (APDI dan JAPPDI) menyampaikan bahwa belum mendapatkan saluran daging kerbau dari PT PPI dan PT Berdikari (maupun PT Suri sebagai kepanjangan tangan BUMN). Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu ketersediaan/stok dan stabilisasi harga daging di pasaran menjelang Hari Raya Idul Fitri (harga daging kerbau diperkirakan dapat mencapai 140 ribu-150 ribu/kg).
- c) PT PPI dan PT Berdikari memberikan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga daging, serta akan segera melakukan diskusi dan negosiasi dengan APDI dan JAPPDI untuk penyaluran daging lembu. PT Suri juga siap menyalurkan stok daging kerbau dengan harga 70 ribu/kg.
- d) Rencana Tindak Lanjut: PT PPI dan PT Berdikari akan mengundang APDI dan JAPPDI untuk melakukan diskusi dan negosiasi pada tgl 17 Maret 2025

5. Evaluasi Realisasi Impor Daging Lembu Penugasan kepada BUMN Pangan

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 melalui zoom meeting. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi impor daging lembu melalui penugasan kepada BUMN Pangan bersama dengan K/L terkait. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Perwakilan Dirjen PKH Kementan, Perwakilan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Perwakilan PT. Berdikari, dan Perwakilan PT. PPI, dan Direktorat PLDK LNSW. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Berdasarkan hasil pemantauan, harga daging lembu cenderung mengalami kenaikan. Per tanggal 16 Maret 2025, harga daging sapi Rp 136.203/Kg, daging kerbau lokal Rp 143.472/Kg, dan daging kerbau beku Rp 106.422/Kg.
- b) Stok daging lembu per tanggal 14 Maret 2025 sebesar 46.828,98 Ton (24.342,98 Ton di importir, 9.686 Ton di Bulog, 9.500 Ton di PT. Berdikari, dan 3.300 Ton di PT. PPI). Selanjutnya PT. Berdikari dan PT. PPI akan melaporkan data stok melalui Simrek PKH.
- c) Realisasi impor daging lembu secara total per tanggal 14 Maret 2025 sebesar 10.818 Ton (3,7% dari total PI terbit), sedangkan realisasi impor daging lembu melalui penugasan BUMN Pangan sebesar 795 Ton (daging sapi non Brazil dari PT. Berdikari).
- d) PT. Berdikari sudah melakukan pemesanan (PO) daging lembu sebesar 22.448 Ton dengan rincian 3.360 Ton daging sapi Brazil, 8.896 Ton daging sapi non Brazil, dan 10.192 Ton daging kerbau India.
- e) PT. PPI sudah melakukan pemesanan (PO) daging lembu sebesar 11.956 Ton dengan rincian 3.808 Ton daging sapi Brazil dan 8.148 Ton daging kerbau India dengan estimasi kedatangan akhir April atau awal Mei.

- f) Kendala yang dialami PT. Berdikari dan PT. PPI dalam merealisasikan impor daging lembu penugasan adalah harga barang yang cukup tinggi serta kurangnya pasokan di negara asal.
- g) Rencana Tindak Lanjut: PT. Berdikari dan PT. PPI akan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan merealisasikan penugasan impor daging lembu. PT. Berdikari dan PT. PPI akan menyampaikan data harga (harga beli dan landed price), rencana pemasukan sampai akhir tahun 2025, serta realisasi dan distribusi.

6. Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRIN dan BAPANAS

Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk memfinalisasi draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BAPANAS dan BRIN terkait “Sinergitas Kajian Penghitungan Ketahanan Stok Pangan pada Komoditas Pangan Strategis Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan”. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan BAPANAS dan dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, perwakilan OSH BAPANAS, dan perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan BAPANAS. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Latar belakang dari rapat ini yaitu menindaklanjuti keinginan BAPANAS untuk melaksanakan kajian terkait Penghitungan Ketahanan Stok Pangan pada Komoditas Pangan Strategis Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan, maka BAPANAS akan bersinergi bersama dengan BRIN.
- b) Terdapat beberapa poin penting yang disepakati antara BRIN dan BAPANAS dalam draft PKS, diantaranya:
 - Judul kegiatan PKS yang disepakati yaitu: “Sinergitas Kajian Ketahanan Stok Pangan pada Komoditas Pangan Strategis Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan” dengan menghapuskan kata Penghitungan dan merubah semua nomenklatur pada PKS sesuai dengan judul yang telah disepakati
 - Pasal 2 poin b diganti menjadi “melakukan kajian penghitungan ketahanan stok pangan pada komoditas strategis berdasarkan proyeksi neraca pangan”
Pasal 2 poin b, ruang lingkup kegiatan terdiri dari kajian yang terdiri dari kegiatan survey, pendampingan, dll
 - Pasal 2 poin c, ditambahkan redaksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, karena harapannya tim BAPANAS selalu dilibatkan dalam kajian ini yang dapat meningkatkan kapasitas SDM BAPANAS
 - Pasal 2 poin b, menambahkan redaksi pelaporan setelah pemantauan dan evaluasi
 - Pasal 3 ayat 5, mengingat harapan tim BAPANAS juga ikut dilibatkan, maka redaksi “terlibat secara partisipatif dalam setiap tahapan kegiatan terkait kajian ini, maka redaksi menjadi “melaksanakan kajian penghitungan ketahanan stok pangan pada komoditas pangan strategis berdasarkan proyeksi neraca pangan bersama PIHAK KEDUA

- Menambahkan Pasal 3 ayat 6 yaitu “mendapatkan laporan hasil kajian”
 - Pihak pertama dan Kedua menunjuk masing-masing perwakilan PIC Penanggung Jawab Pelaksana dan Narahubung.
 - Terkait pembiayaan kegiatan kajian sepenuhnya berasal dari DIPA BAPANAS.
- c) Terdapat beberapa klausul yang masih ditangguhkan karena perlunya diskusi internal BRIN lebih lanjut, yaitu untuk klausul terkait redaksi “Addendum”, dari BAPANAS mengusulkan untuk diubah redaksinya menjadi “Perubahan” sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional. Namun, dari BRIN akan mendiskusikan terlebih dahulu secara internal. Pada pasal 2 poin d, BAPANAS mengusulkan ditambahkan redaksi “kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK” untuk mengakomodir jika ada perubahan di tengah jalan. Namun BRIN perlu mendiskusikannya secara internal terlebih dahulu, mengingat dari BRIN mengusulkan untuk tidak memasukkan klausul ini dan apabila terdapat perubahan dapat dilakukan addendum
- d) Rencana Tindak Lanjut: BRIN akan merevisi draft PKS sesuai dengan hasil rapat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Selanjutnya BRIN akan mengirimkan draft PKS final untuk dibaca kembali oleh BAPANAS sebelum ditandatangani agar kajian dapat segera dimulai.

7. Pertemuan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Maret 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Nusantara II Kantor Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban untuk menyusun Proyeksi Neraca Pangan tingkat nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunannya diperlukan kolaborasi yang baik dengan semua pihak terkait dan menyepakati proyeksi neraca pangan sebagai pijakan awal untuk menetapkan kebijakan ketersediaan pangan. Pelaksanaan: Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pokja Neraca Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Serelia Kementan, Direktorat STO Kementan, Direktorat Bitpro PKH Kementan, Direktorat Pakan PKH Kementan, Direktorat AKABI Kementan, Pusadatin Kementan, Direktorat STPHP BPS, Direktorat Statistik Distribusi BPS, Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kelautan BPS, Supply chain dan pelayanan publik Perum BULOG, serta observer dari perwakilan Bank Indonesia, Dinas Pangan Wilayah Prov. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Lingkup fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Maret 2025, secara keseluruhan diperkirakan neraca/stok sampai dengan bulan Maret 2025 aman untuk semua komoditas.
- b) Potensi produksi beras dan jagung bulan Januari – April 2025 berdasarkan KSA BPS dan Mei-Desember 2025 berdasarkan rencana produksi Ditjen Tanaman Pangan Kementan.

- c) Komoditas bawang putih dan daging sapi penugasan perlu mendapatkan perhatian karena sampai bulan maret 2025 realisasi masih kecil, dimana realisasi impor impor bawang putih konsumsi sebesar 13% dan daging sapi/kerbau penugasan sebesar 5,5% dari PI terbit, sehingga perlu adanya percepatan realisasi impor.
- d) Angka tetap impor pada komoditas jagung, bawang putih, daging sapi/kerbau tahun 2024 akan dirilis oleh BPS pada bulan Mei-Juni 2025
- e) Rencana Tindak Lanjut : Bapanas akan mengirimkan hasil updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Maret 2025 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

8. Rapat koordinasi pembahasan data dan informasi terkait ketersediaan padi dan beras nasional

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengelolaan produktivitas padi dan beras secara nasional, serta untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan komprehensif dalam pengambilan kebijakan pangan. Kegiatan rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Swasembada Lt. 3 Kementerian Koordinator Bidang Pangan Gedung Graha Mandiri - Jakarta Pusat. Rapat dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rapat dihadiri oleh Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Perwakilan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Perwakilan BRIN, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog dan Ketua Umum Perpadi. Hasil pelaksanaan Kegiatan:

- a) Untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian menargetkan sasaran luas tanam padi tahun 2025 sebesar +/- 20 juta ha. Ketua Umum Perpadi menyampaikan terkait luas tanam padi aktual pada beberapa tahun ini berada di sekitar 10-12 juta ha.
- b) Secara umum komoditi beras diklasifikasi menjadi dua: Beras Umum dan Beras Khusus. Beras Umum terdiri dari Beras Medium dan Beras Premium. Berdasarkan Perbadan No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, Beras Khusus terdiri dari 9 jenis: Beras ketan, Beras merah, Beras hitam, Beras varietas lokal, Beras fortifikasi, Beras organik, Beras indikasi geografis, Beras dengan klaim kesehatan, dan Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- c) Izin impor Beras Khusus (beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri) pada tahun 2024 sebesar 40 ribu ton dengan realisasi impor sebesar 34 ribu ton. Dalam rangka swasembada pangan, diperlukan Road Maps terkait impor Beras Khusus.

- d) Usulan terkait Road Maps impor Beras Khusus yaitu pendekatan impor tidak berdasarkan kebutuhan akan tetapi berdasarkan pasokan dengan memperhatikan kemampuan produksi Beras Khusus di dalam negeri dan dilakukan secara bertahap.
- e) Beberapa varietas Beras Khusus telah di hasilkan di dalam negeri. Untuk Beras Jasmine sudah dapat di produksi di dalam negeri. Substitusi Beras Japonica adalah Beras Tarabas yang telah dapat diproduksi di dalam negeri sedangkan Beras Basmati masih perlu penelitian lebih lanjut. Beberapa produsen lokal juga telah dapat memproduksi Beras Fortifikasi.
- f) Kesimpulan dan Tindak Lanjut: Rapat Koordinasi sepakat terkait kewenangan impor Beras Khusus, peran pembinaan akan dikembalikan ke Kementerian Pertanian. hal ini sejalan dengan data produksi beras yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Rapat Koordinasi sepakat untuk menetapkan Road Maps produksi Beras Khusus 2025-2028.

9. Rapat Koordinasi Teknis Monitoring Realisasi Impor Gula dan Daging Lembu

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan monitoring realisasi impor gula dan daging lembu untuk menjaga harga pada Idul Fitri 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Ditjen PKH dan Ditjen Perkebunan Kementan, perwakilan Dit. Ketersediaan Pangan Bapanas, perwakilan Ditjen Impor Kemendag, perwakilan KemenBUMN, perwakilan dari LNSW, Kemenkeu, dan perwakilan dari BUMN (Berdikari, PPI, dan RNI) . Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Update data gula konsumsi tanggal 7 Maret 2024, terkait harga Harga rata-rata nasional sebesar Rp 18.481/kg, harga tertinggi Rp 20.429/kg di Maluku Utara, dan harga terendah Rp 16.944/kg di Kepri. Stok total sebesar 698.021,72 ton terdiri dari stok di swasta sebesar 382.905 ton dan di BUMN sebesar 315.116,06 ton (milik BUMN, petani, dan pedagang). Berdasarkan laporan RNI, terdapat stok GKP sebesar 1.272 ton, stok GKM di PG Rajawali I sebesar 37.000 ton dan di PG Candi Baru sebesar 25.000 ton. PTPN melaporkan memiliki stok GKP sebesar 39.724 Ton.
- b) PI penugasan gula konsumsi 200.000 setara GKM sudah diterbitkan seluruhnya per tgl 3 Maret 2025 dengan alokasi ke PG Rajawali II sebesar 92.000 Ton, PG Rajawali I sebesar 63.000 Ton, dan PG Candi Baru sebesar 45.000 Ton
- c) Update data terkait impor daging sapi tanggal 7 Maret 2024, yaitu: Update stok sementara dari Kementan sebesar 742 Ton daging sapi Australia dari PT Berdikari dan stok di importir masih belum ada update.

- d) PI terbit daging sapi ada sebanyak 43 PI sebesar 80.000 Ton dan untuk penambahan 100.000 Ton masih menunggu arahan. Realisasi impor yang tercatat di Sinas NK sebesar 5.071.91 Ton. Sementara PI terbit daging sapi penugasan sebanyak 2 PI sebesar 100.000 Ton (PPI dan Berdikari masing-masing 50.000 Ton) dan realisasi sebesar 717,11 Ton.
- e) Update data terkait impor daging kerbau tanggal 7 Maret 2024, yaitu: Harga rata-rata nasional daging kerbau beku sebesar Rp 106.137/kg, harga tertinggi Rp 135.000/kg di Sumut, dan harga terendah Rp 95.714/kg di Kalteng. Harga rata-rata nasional daging kerbau segar sebesar Rp 142.917/kg, harga tertinggi Rp 155.000/kg di Aceh, dan harga terendah Rp 120.000/kg di NTB. Update stok sementara dari Kementan masih belum ada dan dari BUMN menyampaikan stok untuk OP dari Berdikari total sebesar 10.000 Ton dan dari PPI sebesar 3.500 Ton. PI terbit daging kerbau penugasan sebanyak 2 PI sebesar 100.000 Ton (PPI dan Berdikari masing-masing 50.000 Ton) dan belum ada realisasi. Rencana Tindak Lanjut: akan dilakukan rapat koordinasi monitoring realisasi impor gula dan daging lembu pada hari jum'at 14 Maret 2025.

10. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Neraca Komoditas Beras

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 di RR Utama Kemenko Bidang Pangan, Gd. Graha Mandiri. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi NK beras terkait Pembina komoditas beras khusus. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kemenko Pangan dan dihadiri oleh Sesmenko bidang Pangan, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Pangan, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, perwakilan Ditjen TP Kementan, perwakilan Deputi KSP Bapanas, perwakilan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, dan perwakilan dari LNSW Kemenkeu. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Berdasarkan Surat Sesmenko Perekonomian tanggal 30 Desember 2022, Badan Pangan Nasional diberikan kewenangan melakukan verifikasi rencana kebutuhan impor beras khusus di Sinas NK sejak penetapan NK 2023. Saat ini surat tersebut dinilai tidak cukup kuat menjadi dasar Bapanas melakukan verifikasi rencana kebutuhan impor beras khusus tahun 2025.
- b) Berdasarkan PP No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, K/L Pembina sektor komoditas beras khusus adalah Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).
- c) Dengan pertimbangan di atas, maka proses verifikasi impor beras khusus akan

sejalan jika dilakukan kembali oleh Kementan.

- d) Tugas verifikasi impor beras khusus kembali dilakukan oleh Kementan dimulai dari NK tahun 2025 dan seterusnya.
- e) Perlu diterbitkan surat dari Sesmenko Bidang Pangan untuk: menggugurkan Surat Sesmenko Bidang Perekonomian tahun 2022 yang menjadi dasar pendelegasian tugas verifikasi kebutuhan impor beras khusus ke Bapanas. Untuk menjadi dasar pengembalian tugas verifikasi kebutuhan impor beras khusus ke Kementan. Dengan menjadi dasar bagi LNSW dalam mengalihkan tugas verifikasi dalam sistem Sinas NK dari Bapanas kembali ke Kementan.
- f) Tindak lanjut : Kemenko Pangan akan menerbitkan Surat Sesmenko Pangan yang mengalihkan tugas Bapanas dalam melakukan verifikasi impor beras khusus kembali ke Kementan, dan tugas LNSW untuk menyesuaikan pengalihan kewenangan verifikasi dari Bapanas ke Kementan secara kesisteman di Sinas NK

11. Rapat Koordinasi Teknis Monitoring Realisasi Impor Gula dan Daging Lembu

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan monitoring realisasi impor gula dan daging lembu untuk menjaga harga pada Idul Fitri 2025. Pertemuan dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Ditjen PKH dan Ditjen Perkebunan Kementan, perwakilan Dit. Ketersediaan Pangan Bapanas, perwakilan dari LNSW, Kemenkeu, dan perwakilan dari BUMN (Berdikari, PPI, dan RNI). Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) sesuai dengan amanat Rakortas di Bidang Pangan Evaluasi Implementasi NK Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025, maka perlu dilakukannya monitoring realisasi impor untuk komoditas gula dan daging lembu, sehingga harga di tingkat konsumen dapat turun dan terjangkau oleh masyarakat terutama dalam menghadapi HBKN Idul Fitri 2025.
- b) Update data gula konsumsi, stok total GKP sebesar 649.315,84 ton (swasta: 251.533,43 ton dan BUMN: 297.782,42 ton) dan stok GKM sebesar 58.000 Ton (PG Rajawali I sebesar 37.000 ton (mulai diolah bulan April), PG Candi Baru sebesar 21.000 ton (akan diolah). * PI terbit penugasan gula konsumsi 2025 sebesar 200.000 GKM belum ada realisasi. Progress saat ini ada di tahap penyusunan kontrak dan negosiasi pemasukan hingga 30 Maret, dengan rencana realisasi di bulan April.
- c) Update data terkait impor daging sapi, yaitu: Update stok daging sapi dari Kementan per 7 Maret 2025 sebesar 18.432 Ton, sedangkan data per 14 Maret belum tersedia. Stok PT Berdikari 947,70 Ton (dari Australia). Realisasi impor daging sapi konsumsi reguler yang tercatat di Sinas NK sebesar 8.697,52 Ton dari

PI total 80.000 Ton. Progress realisasi daging sapi penugasan sebesar 795,04 Ton dari PI total 100.000 Ton oleh PT Berdikari. PT Berdikari sudah melakukan pemesanan tambahan sebesar 8.876 Ton dari Australia dan New Zeland dan 3.360 Ton dari Brazil. Belum ada realisasi impor daging sapi PT PPI, namun sudah melakukan pemesanan daging sapi sebesar 2.268 Ton dari Brazil.

- d) Update data terkait impor daging kerbau, yaitu: Stok di PT Berdikari sebesar 9.500 Ton dan di PT PPI sebesar 3.300 Ton. Update stok dari Kementan untuk data per 7 Maret, yaitu 9.756 Ton stok di bulog dan 7.615 di importir sementara stok tgl 14 Maret belum tersedia. Belum ada realisasi impor daging kerbau PT Berdikari, namun sudah ada pemesanan daging kerbau dari India sebesar 10.192 Ton dengan rencana kedatangan bertahap mulai M4 Maret estimasi sebesar 1.000 Ton. Belum ada realisasi impor daging kerbau PT PPI, namun sudah ada pemesanan ke India 8.148 Ton dengan rencana pemasukan M2 April sekitar 420 Ton.
- e) BAPANAS menyampaikan progress penambahan PI 100 ribu ton saat ini masih menunggu arahan dari pimpinan sembari melihat progress realisasi dari pelaku usaha sampai dengan saat ini.
- f) Penugasan harus betul-betul dimonitor tidak hanya untuk rencana realisasi dan realisasinya, namun harus dimonitor juga distribusinya agar tepat sasaran.
- g) PT Berdikari dan PT PPI menyampaikan akan berkoordinasi dengan distributor D1-nya agar dapat memberikan laporan distribusi sampai di distributor D2.
- h) Rencana tindak lanjut: Akan dilakukan rapat koordinasi monitoring realisasi impor gula dan daging lembu pada hari jum'at 21 Maret 2025.

12. Perkembangan Komoditas Pangan Strategis untuk Pemenuhan HBKN

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 13 Maret 2025 melalui Zoom Meeting. FGD ini bertujuan untuk menggali informasi terkini terkait perkembangan pasokan komoditas pangan strategis dan realisasi impor pangan strategis serta untuk perumusan kebijakan bagi Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga. Pertemuan FGD dipimpin oleh Perwakilan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI dan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Departemen Regional BI, dan BI Regional wilayah Aceh, Makassar, dan Bali. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Februari 2025, diperkirakan neraca/stok pangan menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri aman. Namun demikian komoditas yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu komoditas bawang putih. Diperlukan percepatan realisasi impor bawang putih

dalam rangka penyediaan pangan menjelang HBKN.

- b) Kebutuhan pada momentum HBKN 2025 mengalami lonjakan permintaan. Peningkatan konsumsi terbesar terdapat pada komoditas bawang merah dan daging ayam sebesar 10%.
- c) Bapanas melakukan pemantauan harga di dua entitas yaitu tingkat produsen dan konsumen melalui Panel Harga. Beberapa komoditas strategis termasuk kategori waspada dan segera diintervensi harga beras di tingkat konsumen yang stabil tinggi terutama di Zona 2 dan Zona 3.
- d) Selain itu, harga cabai rawit merah di tingkat konsumen mengalami kenaikan. Pemerintah telah melaksanakan Rakor SPHP Cabai sebagai antisipasi gejolak harga dengan memberikan dukungan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) ataupun dengan harga penjualan langsung oleh Champion Rp50.000/kg.
- e) Pemerintah berupaya untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pada periode HBKN Idulfitri dengan melakukan GPM, SPHP dan juga Operasi Pasar Pangan Murah yang dilakukan di seluruh Indonesia

13. Rapat Koordinasi Awal Pembinaan Statistik Sektor

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada Senin, 17 Maret 2025. Kegiatan bertujuan untuk koordinasi awal terkait pembinaan statistik sektoral guna mendukung penyediaan data statistik resmi negara yang objektif, independen, berkualitas, dan terpercaya. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, serta dihadiri oleh perwakilan dari K/L terkait meliputi Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Berdasarkan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJN 2025-2045, penyelenggaraan statistik berkelas dunia merupakan bagian dari arah kebijakan transformasi digital. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengelolaan kualitas statistik, meliputi penguatan sistem statistik nasional, pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia, penjaminan kualitas data, penguatan proses bisnis statistik, dan penguatan kelembagaan.
- b) Penyelenggaraan Statistik Resmi Negara meliputi penyelenggara statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/Lembaga (K/L).
- c) Data yang berasal dari berbagai K/L harus memiliki kualitas yang baik dan terintegrasi, sehingga dilakukan pembinaan kegiatan statistik sektoral sehingga

statistik sektoral yang dihasilkan dapat menjadi statistik resmi negara yang objektif, independen, berkualitas, dan terpercaya.

- d) Strategi pembinaan statistik yaitu pembinaan berdasarkan hasil EPSS, fokus pada indikator Pembangunan dan data prioritas, metode pembinaan melalui workshop, hands-on, FGD, koordinasi/ kolaborasi, dan komitmen pimpinan BPS maupun K/L/Pemda.
- e) Pembinaan terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, dengan pertemuan selanjutnya merupakan pembinaan identifikasi kegiatan statistik sektoral.
- f) Identifikasi kegiatan statistik sektoral bertujuan untuk mempermudah K/L/Pemda untuk memilih kegiatan yang menjadi fokus penilaian EPSS dan membangun pusat rujukan informasi statistik.
- g) Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- h) Kegiatan statistik adalah rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang bertujuan menghasilkan data statistik.
- i) Rencana Tindak Lanjut: setiap K/L menyampaikan identifikasi kegiatan statistik yang diselenggarakan masing-masing K/L dan dilakukan pembinaan terkait identifikasi kegiatan statistik sektoral pada tanggal 14 April 2025. Setiap K/L diharapkan mengisi formulir narahubung K/L/Pemda untuk nanti sebagai penghubung dalam rangka pembinaan kegiatan statistik sektoral.

14. Koordinasi TPIP dan Finalisasi Program Kerja TPIP 2025-2027

Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Hotel Sari Pacific Jakarta. Kegiatan bertujuan untuk mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga anggota TPIP terkait finalisasi program kerja Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 dan program kerja TPIP Tahun 2025, serta penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas TPIP Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi atas upaya pengendalian inflasi tahun 2024. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter serta dihadiri oleh Asdep Kemenko Pangan, perwakilan Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Bina Pasar dalam Negeri Kemendag, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Kemendag, Biro Perencanaan Kementan, Ditjen Tanaman pangan Kementan, Ditjen Hortikultura Kementan, Ditjen Perkebunan Kementan, Direktorat Supply Chain Perum BULOG, Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktorat SPHP Bapanas, Direktorat DCP Bapanas, Ditjen Perbubungan Udara dan Laut Kemenhub, dan Direktorat Minyak dan

Gas Bumi Kemen ESDM. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Hasil Evaluasi peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 mayoritas terlaksana sesuai target dimana terdapat 25 program sesuai target (86%) dan 4 program masih dibawah target (14%).
- b) Sedangkan hasil evaluasi program TPIP 2024 dimana program keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan efektif mengendalikan tekanan inflasi, dari program yang dijalankan ada 28 program sesuai target (97%) dan 1 program dibawah target (3%).
- c) Program kerja tahun 2022-2024 berhasil meningkatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta memperkuat ketersediaan data pangan, namun harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan kedepannya.
- d) Program kerja TPIP 2025-2027 masih mengusung program K4 yaitu Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dengan sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga keterjangkauan harga dan kesinambungan pasokan pangan.
- e) Direktorat Ketersediaan Pangan masuk di dalam program kerja tim pengendalian inflasi dalam program kerja komunikasi efektif (K4) terkait penyediaan sistem informasi data harga dan pasokan pangan yang terintegrasi dimana target pada tahun 2024 yaitu ketersediaan data neraca pangan di 38 provinsi, 514 kab/kota dan 1 laporan pusat setiap bulan, dari target tersebut ketersediaan data neraca pangan wilayah hanya tersedia di 35 provinsi (92%) dan 454 kab/kota (88%) sehingga secara keseluruhan sudah tercapai 90% dari target yang ditetapkan
- f) Terkait program kerja tim pengendalian inflasi tahun 2025-2027, target pada Direktorat Ketersediaan Pangan masih sama dengan tahun 2024 yaitu ketersediaan data neraca pangan di 38 provinsi, 514 kab/kota dan 1 di Pusa
- g) Rencana Tindak Lanjut : masing-masing K/L mengkonfirmasi kembali data pada program kerja yang sudah disusun oleh tim pengendalian inflasi untuk kebutuhan penyusunan laporan TPIP 2024, serta konfirmasi data untuk penyusunan program kerja pengendalian inflasi 2025-2027.

15. Rapat Koordinasi Teknis Monitoring Realisasi Impor Gula dan Daging Lembu

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 21 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memonitoring realisasi impor komoditas gula dan daging lembu, sehingga harga di tingkat konsumen dapat turun dan terjangkau oleh masyarakat pada saat menjelang Idul Fitri 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri dan dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Kesmavet Kementan, Perwakilan Direktorat Impor Kemendag,

perwakilan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Perwakilan Direktur PLDK LNSW, perwakilan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk KemenBUMN, perwakilan Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan KemenBUMN, perwakilan Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan, perwakilan BUMN (PT. Berdikari, PT. PPI dan PT. RNI). Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Total stok GKP sebesar 641.215,60 Ton dengan rincian 341.521,49 Ton di swasta dan 299.694,12 Ton di BUMN, serta terdapat stok GKM sebesar 37.000 Ton milik PG Rajawali I dan 19.597 Ton milik PG Candi Baru.
- b) Saat ini belum terdapat realisasi impor GKM Penugasan. PT. RNI sedang menyusun kontrak dan bernegosiasi dengan supplier. Rencana pemasukan GKM sebesar 200.000 Ton sampai dengan 30 Maret 2025.
- c) PTPN melalui anak perusahaannya PT. SGN sudah mendistribusikan gula konsumsi ke 314 titik operasi pasar sebesar 545.000 kg dan sebesar 429.000 kg sudah diserap pasar.
- d) Kementan menyampaikan stok daging sapi yang berada di importir per tanggal 14 Maret 2025 sebesar 17.424 Ton. Per tanggal 21 Maret 2025, PT. Berdikari memiliki stok daging sapi yang berada di distributor sebesar 968,86 Ton.
- e) Realisasi impor daging sapi regular berdasarkan Dit. Impor Kemendag sebesar 10.045 Ton sedangkan berdasarkan Sinas NK sebesar 13.674,96 Ton. Untuk realisasi impor daging sapi penugasan berdasarkan Dit. Impor Kemendag sebesar 947,7 Ton, sedangkan berdasarkan Sinas NK sebesar 968,86 Ton.
- f) PT. Berdikari sudah melakukan pemesanan 5.177 Ton daging sapi Brazil dan 9.436 Ton daging sapi non Brazil. Hingga akhir bulan Maret rencana pemasukan akan bertambah sebesar 1.000 Ton dari non Brazil, sedangkan dari Brazil akan masuk di akhir bulan April atau awal Mei karena waktu pengiriman yang panjang.
- g) PT. PPI sudah melakukan pemesanan sebesar 3.808 Ton daging sapi Brazil, yang akan tiba di minggu ke 3 bulan April hingga Mei.
- h) PT. Berdikari dan PT. PPI sedang berkoordinasi dengan D1 terkait data pendistribusiannya.
- i) Bapanas menyampaikan bahwa alokasi impor 100.000 Ton untuk regular saat ini masih menunggu arahan pimpinan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bapanas, saat ini alokasi tersebut belum bisa diberikan.
- j) Stok daging kerbau per tanggal 14 Maret 2025 yang berada di importir sebesar 6.919 Ton dan stok milik Bulog sebesar 9.686 Ton. Sedangkan stok milik PT. Berdikari sebesar 8.000 Ton yang berada di distributor dan stok milik PT. PPI sebesar 580 Ton.

- k) Saat ini belum terdapat realisasi impor daging kerbau penugasan, karena terdapat kendala terkait produksi di negara supplier (India) dan harga yang tinggi.
- l) PT. Berdikari sudah melakukan pemesanan sebesar 10.892 Ton dan rencana akan masuk sebesar 500 Ton pada akhir bulan Maret. Sedangkan PT. PPI telah melakukan pemesanan sebesar 8.568 Ton yang direncanakan akan masuk pada minggu ke 2 dan ke 3 bulan April.
- m) Rencana Tindak Lanjut: PT. Berdikari dan PT. PPI akan menyampaikan data sebaran distribusi daging sapi dan daging lembu dari D1

16. Rencana Aksi dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pangan Berbasis Ruminansia

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 di hotel Avenzel. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas Rencana Aksi dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem. Pangan Berbasis Ruminansia dengan K/L terkait serta akademisi. Rapat dipimpin oleh Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas dan dihadiri oleh Asdep Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Kemenko Pangan, Direktur Pakan Kementan, Direktur Standar Karantina Hewan Barantin, Direktur Tindakan Karantina Hewan, Kapus Riset Peternakan BRIN, Perwakilan Kementan, Perwakilan Kementerian Kehutanan, Perwakilan Bapanas, Perwakilan BUMN dan Swasta, Perwakilan Mitra Pembangunan, dan Tim Expert IPB. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Pada Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 mewujudkan trisulan pembangunan salah satu program unggulannya adalah swasembada pangan, energi, dan air. Perkembangan penyusunan Rencana Aksi pada bulan Januari - Maret 2025 adalah finalisasi draf Rencana Aksi dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pangan Berbasis Ruminansia.
- b) Renaksi ini merupakan penjabaran tahapan Peta Jalan Peternakan Nasional tahun 2025 - 2035 dalam mewujudkan swasembada daging dan Makan Bergizi Gratis.
- c) Isu yang dihadapi dalam pemenuhan pangan hewani antara lain produksi dalam negeri masih rendah, infrastruktur pendukung masih rendah, value chain ekosistem peternakan berbasis rakyat masih belum terbentuk dan kebutuhan daging diperkirakan terus meningkat.
- d) Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari isu tersebut adalah importasi indukan dan bakalan, pengadaan dan penguatan input peternakan, penguatan infrastruktur, dan pengembangan rantai nilai terintegrasi dari hulu ke hilir.

- e) Tantangan dan permasalahan utama usaha peternakan ruminansia besar adalah teknis produksi (pakan dan bibit), lingkungan dan sosial, kebijakan dan regulasi, serta ekonomi dan pasar.
- f) Strategi percepatan pemenuhan daging sapi dan susu sapi antara lain dengan mengimpor 1 juta ekor sapi indukan dan 1 juta ekor sapi perah selama tahun 2025 - 2029, penyediaan lahan 500 ribu ha, dukungan regulasi dan infrastruktur, peningkatan teknologi pakan, dan peningkatan kapasitas SDM.
- g) Selain mengupayakan pengelolaan ruminansia besar, harus ada dukungan dari pengelola ruminansia sedang dan kecil untuk menunjang ekosistem ruminansia.
- h) Saat ini sudah dikembangkan proyek strategis nasional (PSN) terkait ruminansia besar 16 PSN di pulau Jawa dan 13 PSN di luar pulau Jawa.
- i) Mengembangkan peternakan sapi perah di dataran rendah, karena sudah terdapat beberapa yang mengimplementasikan, dan sebagian besar konsumsi susu di daerah dataran rendah.
- j) Perlu penjaminan pemanfaatan lahan untuk megafarm, dan salah satu caranya bisa menggunakan satu pulau untuk megafarm.
- k) Memanfaatkan lahan TNI dan kawasan hutan ketahanan pangan untuk penanaman rumput pakan berkualitas, sebagai upaya ketersediaan pakan ternak.
- l) Perlu disusun rencana aksi mengenai swasembada daging dan susu yang melibatkan K/L terkait dan perlu didetailkan tugas dan fungsi setiap K/L.
- m) Perlu mempertimbangkan aspek antropologis dalam mengembangkan peternakan di Indonesia, serta mempertimbangkan faktor cuaca yang akan berpengaruh pada kesehatan hewan.
- n) Rencana Tindak Lanjut: Akan dilakukan finalisasi draf Rencana Aksi dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pangan Berbasis Ruminansia.

17. Rapat Koordinasi Teknis terkait Kewenangan Verifikasi Rencana Kebutuhan oleh Kementerian/Lembaga

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 melalui zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait verifikasi rencana kebutuhan neraca komoditas beras khusus dan daging lembu. Pertemuan dipimpin oleh Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan dihadiri oleh Asdep Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Kemenko Pangan, Asdep Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian Kemenko Pangan, Kepala Biro Umum Kementan, Kepala Biro Perencanaan Kementan, Direktur Kesmavet Kementan, Direktur Serelia Kementan, Direktur

Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Kementan, LNSW, dan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas. Poin-poin hasil pertemuan :

- a) Berdasarkan surat Sesmenko Pangan No. B-150/SES.M.PANGAN/SD/03/2025 perihal Penetapan Kementerian Pembina Sektor Komoditas Beras Khusus pada Rakor Es.I tgl 10 Maret 2025, tentang Monev K/L Pembina Sektor Komoditas Beras Khusus, telah disepakati bahwa kewenangan verifikasi RK Beras Khusus dikembalikan ke Kementan.
- b) Posisi saat ini untuk usulan RK pelaku usaha di Sinas NK sudah dialirkan ke Kementan.
- c) PIC verifikasi teknis maupun jumlah RK beras khusus di Kementan berada di Ditjen Tanaman Pangan.
- d) Bapanas dapat melakukan penginputan data kebutuhan beras khusus di Sinas NK sebagai pertimbangan untuk penetapan RK beras khusus. Namun, sesuai rakornis monitoring implementasi NK beras dan jagung tgl 12 Maret 2025 disampaikan bahwa data realisasi impor pada tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan pertimbangan penetapan jumlah RK per pelaku usaha selama data kebutuhan nasional beras khusus belum dapat disediakan oleh Bapanas.
- e) Kewenangan verifikasi jumlah rencana kebutuhan impor daging lembu reguler belum dapat diputuskan.
- f) Rencana Tindak Lanjut : Ditjen TP Kementan dapat segera menyampaikan surat usulan penyelenggaraan rakortas untuk menetapkan RK beras khusus ke Kemenko Pangan. Kemenko Pangan akan membawa Keputusan hasil rapat tanggal 25/03/2025 ke dalam rapat Tingkat eselon 1 untuk memutuskan secara final terkait penanggungjawab yang melakukan verifikasi volume rencana kebutuhan daging lembu untuk konsumsi reguler dari pelaku usaha

b). Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan

1. Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Cabai

Rakor SPHP Cabai yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 secara *online*. Rapat dipimpin oleh Direktur SPHP dan dihadiri oleh Deputi II Bidang Ekonomi dan Pangan KSP, perwakilan Itjen Kemendagri, perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga Dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, perwakilan Kementan (Dit. STO dan Dit. Hilirisasi Ditjen Hortikultura serta Pusdatin), Kepala DKP Prov NTB, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTB, perwakilan DKP Lombok Tengah, perwakilan Dinas Pertanian Lombok Tengah, Satgas Pangan, Ketua ACCI, dan Champion Lombok Timur.

Rakor dilaksanakan dalam rangka mencermati kenaikan harga cabai rawit merah (CRM) di provinsi NTB khususnya di Kab. Lombok Tengah yang mencapai Rp 200.000/kg.

Harga rata-rata Cabai Rawit Merah (CRM) secara nasional di produsen per 4 Maret 2025 berkisar Rp 73.774/kg dan di tingkat konsumen Rp94.193/kg. Dimana harga terendah di tingkat produsen berkisar Rp 45.600/kg di Sulsel dan harga tertinggi berkisar Rp 114.000/kg di NTB. Sementara di tingkat konsumen wilayah Papua Tengah berkisar di harga Rp 53.333/kg dan harga tertinggi berkisar Rp 138.333/kg di Kaltara. Berdasarkan panel harga pangan per tanggal 4 Maret 2025 terdapat 378 wilayah Kab/Kota dengan harga CRM di atas HAP dan 32 wilayah Kab/Kota di bawah HAP. Harga tertinggi di Kab. Lombok Tengah sebesar Rp 200.000/kg, Kab. Lombok Timur sebesar Rp180.000/kg, Kab. Lombok Barat sebesar Rp 180.000/kg.

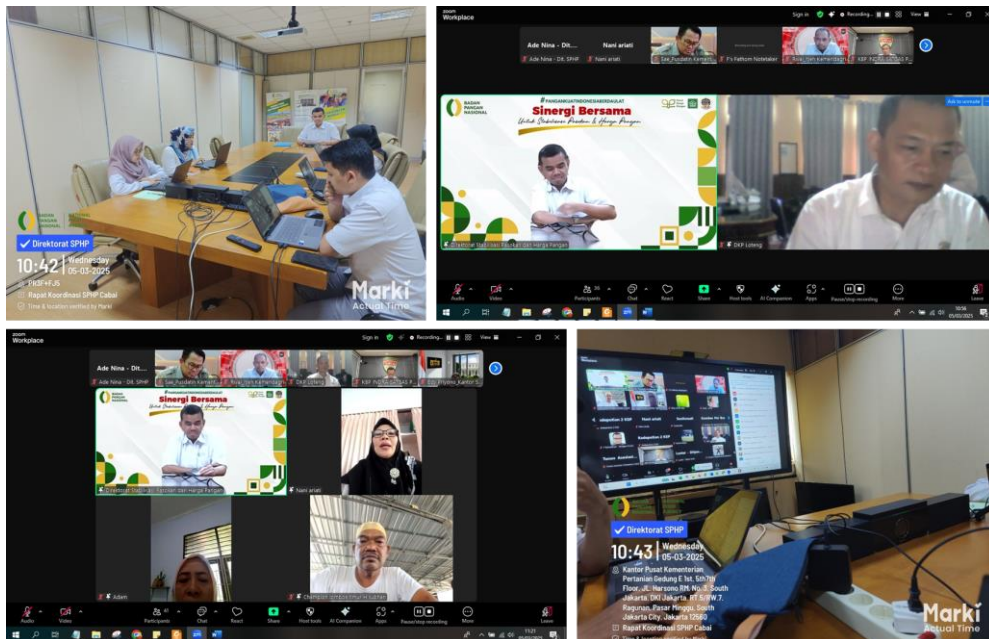
Lombok Tengah bukan merupakan sentra produksi cabai. Ketersediaan cabai di Lombok Tengah terbatas menyebabkan harga tinggi, sehingga mendatangkan dari Lombok Timur dengan harga Rp 180.000/kg. Pemantauan pada tanggal 5 Maret 2025 harga CRM di Pasar Induk Lombok Tengah Rp 95.000-120.000/kg. Champion Lombok Timur menyampaikan secara umum dalam kondisi normal produksi di Lombok Timur dapat memenuhi sekitar 90% kebutuhan sehingga masih membutuhkan pasokan dari Jawa Timur (10%).

Kenaikan harga cabai rawit merah di Provinsi NTB dipengaruhi oleh petani libur petik (panen) pada awal bulan puasa (2 hari), serta adanya cuaca ekstrim yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Upaya yang dilakukan Champion Lombok Timur adalah melaksanakan aksi jual cabai rawit dengan harga petani (volume penyaluran 300 kg/hari dengan kemasan Rp 15.000/0,25kg). Dinas Pertanian Lombok Timur menyampaikan upaya menurunkan harga cabai melalui kerja sama dengan Champion Lombok Timur sesuai dengan arahan Menteri Pertanian untuk menjual CRM dengan harga petani. Perwakilan Dit. STO Kementan menyampaikan bahwa sudah mengeluarkan surat himbauan Direktur STO tertanggal 21 Februari 2025 kepada Champion perihal partisipasi dalam kegiatan Operasi Pasar (OP) Pangan Murah dengan fokus pada domisili masing-masing Champion.

Tindak Lanjut dari Rakor adalah sebagai berikut:

- Bapanas akan bersurat kepada Ditjen Hortikultura terkait optimalisasi partisipasi Champion dalam kegiatan GPM dan Gerakan Jual Cabai Harga Petani di luar domisili Champion.
- Dinas Ketahanan Provinsi NTB dan Dinas Pertanian Prov NTB dan DKP Lombok Tengah berkoordinasi dengan Champion cabai untuk menentukan titik lokasi penyaluran, volume dan harga
- Kementerian Dalam Negeri dimohon dapat mengirimkan Panduan Teknis terkait Penggunaan BTT untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi/kabupaten/kota

di seluruh Indonesia sebagai salah satu instrumen acuan di daerah dalam mengoptimalkan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.



2. Rapat Pembahasan Lanjutan Dokumen PKS dengan BMKG

Rapat dipimpin oleh Kapusdatin Bapanas dan dihadiri oleh Kepala Biro OSH Bapanas, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, perwakilan masing-masing direktorat Bapanas, dan dihadiri online oleh perwakilan BMKG (Direktorat Meteorologi Publik, Direktorat Informasi Iklim Terapan, Direktorat Informasi Perubahan Iklim, Direktorat Data dan Komputasi, Direktorat Sistem Jaringan dan Komunikasi dan Biro hukum, Humas dan Kerja Sama).

Rapat merupakan tindak lanjut dari pasal 24 Pebadan 3 tentang Satu Data Pangan di mana kerja sama yang dilakukan produsen data harus melalui persetujuan dan supervisi dari pusat data dan informasi pangan selaku wali data di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pusdatin Bapanas dan BMKG telah melakukan diskusi dan komunikasi intensif melalui korespondensi elektronik guna membahas persiapan kerjasama antara Badan Pangan Nasional dan BMKG terkait pemanfaatan dan pertukaran data, informasi yang diperlukan dan telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Kegiatan ini merupakan kepatuhan Badan Pangan Nasional atas peraturan BMKG nomor 12 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara mengenai tarif Rp0 atas jenis penerimaan negara bukan pajak terhadap kegiatan tertentu.
- Diperlukan kesepakatan dan persetujuan yang sama atas dokumen kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PKS.

- Data panel yang diperlukan oleh Bapanas dari BMKG antara lain data historik hujan dan kemarau, hari tanpa hujan, potensi kemarau, potensi banjir, peta curah hujan, peta sifat hujan, prakiraan awal musim hujan, prakiraan awal musim hujan terhadap normal; yang harapannya bisa digunakan untuk mendukung sistem informasi terkait untuk stabilisasi harga dan stok pangan, kemudian ketersediaan pangan, kerawanan pangan dan kuantitas pangan serta memenuhi kebutuhan sistem informasi pangan.
- a. Rangkaian rapat ditindaklanjuti sebagai finalisasi draft PKS antara Bapanas selaku Pihak Pertama dengan BMKG selaku Pihak Kedua.
- b. Data yang dibutuhkan oleh Direktorat SPHP dari BMKG, yaitu data historis curah hujan dan historis kemarau.
- c. Draft Nota Kesepahaman dan PKS yang sudah difinalisasi dapat di akses di: <https://s.badanpangan.go.id/s/pksmounfabmkg>.



3. Entry Meeting SPHP Beras TW III dan TW IV Tahun 2024

Entry Meeting Reviu SPHP Beras Tw III dan Tw IV Tahun 2024 dilaksanakan secara online pada hari Kamis, 27 Maret 2025. Entry meeting merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang KSP Bapanas kepada BPKP tentang Permohonan Reviu SPHP Beras Tw III dan Tw IV tahun 2024 serta ekspose reviu penyaluran SPHP Beras Tw III dan Tw IV tahun 2024 tanggal 12 Maret 2025 dengan tujuan penyampaian dasar hukum pelaksanaan reviu SPHP Beras.

Rapat dipimpin oleh Direktur SPHP yang dihadiri oleh Direktur Pengawasan Bidang Pangan Pengelolaan Energi dan SDA BPKP, Dir OPP Perum Bulog Inspektur Badan Pangan, Perwakilan Biro PKH BAPANAS, Dir Ketersediaan Pangan, Dir DCP, PPK Anggaran CPP Badan Pangan.

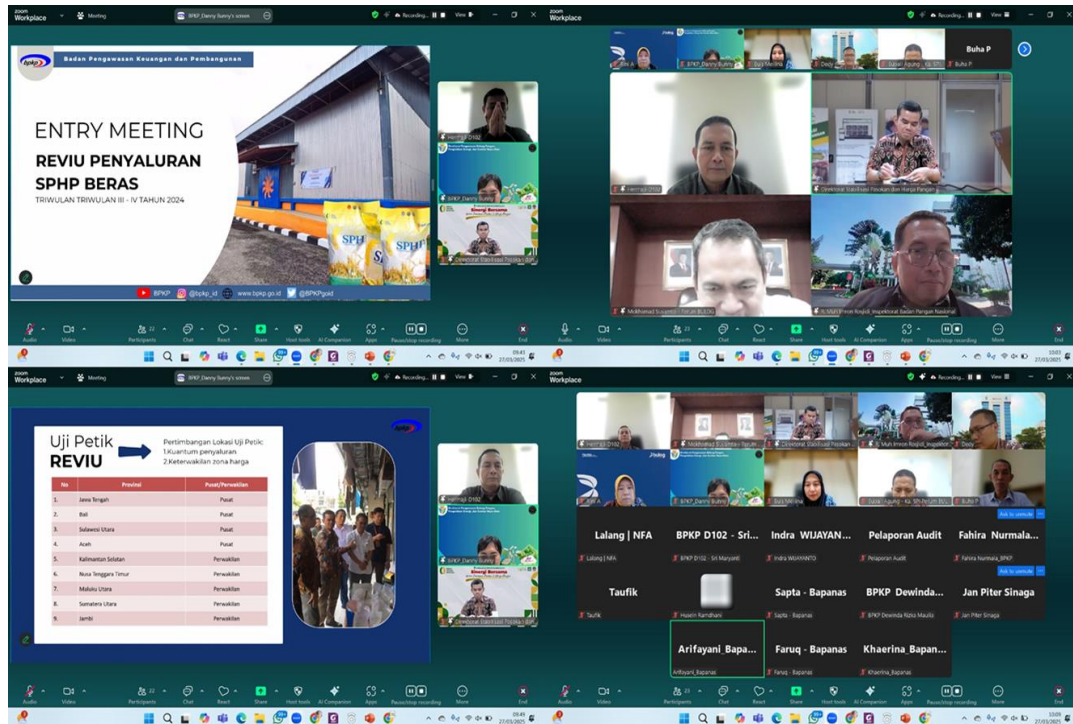
Waktu pelaksanaan reviu dimulai tanggal 24 Maret – 6 Juni 2025 dengan rencana 9 lokasi reviu yang terdiri dari 4 provinsi oleh pusat dan 5 provinsi oleh perwakilan.

Badan Pangan Nasional akan menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh BPKP antara lain: (1) dasar penyaluran SPHP (arahan presiden, kepbadan dan lainnya), (2) Juknis SPHP Beras, dan (3) LHR Penyaluran SPHP beras Tw II yang disiapkan Inspektorat Bapanas.

Pada prinsipnya, Perum BULOG akan berkoordinasi dengan Kanwil dan Kancab Provinsi/Kabupaten/Kota tujuan serta menyiapkan data dukung yang dibutuhkan oleh tim BPKP.

Biro PKH akan memastikan anggaran di DitjenBUN Kemenkeu terkait kesiapan anggaran untuk pembayaran penyaluran Beras SPHP.

Tindak Lanjut pertemuan antara lain untuk mendukung pelaksanaan reviu dimaksud, Direktur SPHP akan bersurat kepada Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perum BULOG untuk melakukan pendampingan pelaksanaan reviu.



4. Rakortas Penyerapan Jagung Tahun 2025

Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan, dilaksanakan pada Senin, 24 Maret 2025. Rakortas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen PKH Kementan, Direktur Utama Perum BULOG, Staf Ahli Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pertemuan membahas pembelian jagung oleh Perum BULOG sebanyak 1 juta ton dan membahas pengadaan beras oleh Perum BULOG, mengingat sudah tanggal 24 Maret 2025 dan mendekati lebaran, akan libur sampai tanggal 7 April 2025 dan panen raya akan segera selesai.

Rakortas merupakan tindak lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyerap jagung dari petani dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp5.500/kg di tingkat petani sebagai Cadangan Jagung Pemerintah.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2025 kebutuhan jagung sekitar 16 juta ton dan ketersediaan 21 juta ton, sehingga estimasi surplus sekitar 5,2 juta ton. Neraca

produksi-kebutuhan Januari-April 2025 surplus 220.000 ton, lebih rendah 420.000 ton dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 namun, stok masih aman.

Sebelumnya Perum BULOG mendapat penugasan pengadaan jagung untuk CJP tahun 2025 sebesar 1 juta ton. Namun demikian, masih terdapat isu apakah pengadaan dari petani dengan rafaksi atau tanpa rafaksi mengingat pengadaan CBP dilakukan tanpa rafaksi. Isu lainnya adalah jumlah pengadaan cukup besar dan perlu usaha ekstra dari perum BULOG untuk melakukan penyerapan jagung.

Dari hasil pembahasan diputuskan bahwa Target pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah selama Tahun 2025 tetap 1 juta ton, karena hanya sekitar 5% dari Produksi Nasional. Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan Rp5.500/kg adalah untuk jagung pipilan kering di tingkat petani yang sudah memasuki usia panen. Selain itu perlu dibuat Instruksi Presiden tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah. Hal tersebut mengingat tidak adanya ketentuan rafaksi, tetapi dengan kualitas yang baik, jagung pipilan kering di tingkat petani, dan yang telah memasuki usia panen.



5. Perkembangan Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Maret 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting Tingkat Petani, Cabai Rawit Merah Tingkat Petani, dan Gula Konsumsi Tingkat Produsen. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Ayam Ras ($12,35\% < \text{HAP}$), Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak ($11,67\% < \text{HPP}$), Kedelai Biji Kering Tingkat Petani ($7,46\% < \text{HAP}$), Sapi (hidup) ($6,47\% > \text{HAP}$), dan Telur Ayam Ras ($4,74\% < \text{HAP}$). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan ($3,53\% < \text{HPP}$).

Perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 Maret 2025 yaitu GKP Tingkat Petani, dan Telur Ayam Ras. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 Maret 2025 yaitu GKG Tingkat Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, dan Bawang Merah.

Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Maret 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (12,53%>HET), Beras Medium Zona 1 (5,09%>HET), Beras Medium Zona 2 (7,47%>HET), Beras Medium Zona 3 (16,87%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (31,40%>HAP), Daging Kerbau Beku (33,61%>HAP), dan Minyakita (12,40%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 (4,55%>HET), Bawang Putih (14,05%>HAP), Cabai Rawit Merah (49,75%>HAP), Gula Konsumsi (5,21%>HAP). dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur & 3TP (7,98%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Maret 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Maret 2025 terjadi pada komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting. Pantauan pada M5 Maret 2025, terdapat 313 Kab/Kota di Atas HAP Bawang Merah dan terdapat 268 Kab/Kota di atas HAP Cabai Merah Keriting.

6. Survei Kunjungan Kerja di Pasar Santa dan Pasar Majestik

Survei dilaksanakan sebagai persiapan kunjungan kerja (Kunker) Kementerian Koordinasi Bidang Pangan dan diikuti oleh Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Pengelola Pasar, Sudin PPKUKM Jakarta Selatan, serta tim Direktorat SPHP Bapanas.

Pelaksanaan Kunker akan dilakukan pada hari Rabu, 5 Maret 2025 yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Dinas Provinsi DKI Jakarta dan/atau Suku Dinas Jakarta Selatan.

7. Rakor Inflasi Kemendagri

Rapat koordinasi dipimpin oleh Mendagri, dihadiri langsung narasumber dari Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BPS, Deputi Basarnas, Dirjen Kemendag, Deputi KSP, Direktur SPHP Bapanas, serta dihadiri secara daring oleh Perum Bulog, Satgas Pangan POLRI, Mabes TNI, dan Kejaksaan Agung.

Inflasi bulan ke bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) tercatat 1,65% (mtm) dengan 1,03% (yoy) dengan komoditas pangan utama penyumbang inflasi antara lain Bawang Merah (1,18%), Ikan Segar (0,06%), Cabai Rawit (0,06%), Daging Ayam Ras (0,03%), Beras (0,02%), dan Bawang Putih (0,02%). Secara historis empat tahun terakhir, komoditas bawang merah dan daging ayam ras selalu mengalami inflasi pada momen Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada Maret 2023 untuk bawang merah dan Mei 2022 untuk daging ayam ras.

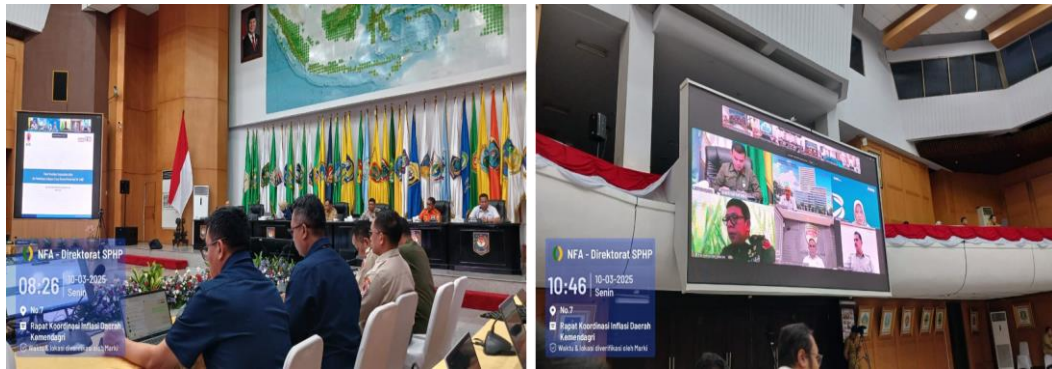
Tingkat inflasi Maret 2025 menurut komponen inti mengalami inflasi sebesar 1,58% (yoy) dengan komoditas dominan yang memberikan andil inflasi yaitu emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk dan nasi dengan lauk. Komponen harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,61% dengan komoditas dominan yang memberikan andil deflasi yaitu tarif listrik, tarif angkutan udara dan bensin. Untuk komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,06 % dengan komoditas dominan yaitu cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.

Perkembangan curah hujan pada Maret 2025 yang didominasi oleh kriteria menengah (36%) dan tinggi (60%) dengan kategori sifat hujan 'atas normal' (65%).

Penurunan produksi Bawang Merah pada Februari dan Maret 2025 yang diakibatkan banjir yang melanda wilayah Pantura, Brebes, Kendal, dan Grobogan dan menyebabkan produktivitas menurun akibat serangan jamur pada pertanaman bawang merah.

Berakhirnya program diskon 50 persen tarif listrik kepada pelanggan rumah tangga PT PLN Persero daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

Diskon tarif angkutan udara untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik mulai tanggal 1 Maret - 7 April 2025 dengan periode penerbangan antara 24 Maret - 7 April 2025.



8. Rakor Pemantauan dan Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025

Rapat Koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 24 Maret 2025, dimana salah satu hasil kesepakatan adalah agar dilakukan pemetaan situasi dan kondisi bahan pangan di masing-masing wilayah dalam mengantisipasi potensi kekurangan pasokan maupun kenaikan harga pangan menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri serta menjamin keamanan dan kelancaran distribusi pangan.

Deputi KSP Badan Pangan Nasional menghimbau agar dalam persiapan HBKN menjelang Nyepi dan Idul Fitri harus di pastikan stok pangan cukup dan dapat mengendalikan harga dengan baik. Kondisi saat ini yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga cabai rawit merah (CRM). Hal ini disebabkan karena panen CRM masih rendah sementara produksi tinggi dan intensitas hujan sangat tinggi. Badan Pangan Nasional melakukan aksi antara lain berkolaborasi dengan (Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan Jaringan Pemotongan dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDII) melakukan operasi pasar terutama daging kerbau agar harga daging dapat dikendalikan.

Sebagian besar Kepala Dinas yang menangani urusan bidang Pangan Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia menyampaikan ketersediaan pasokan dan stok menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri cukup dan aman.

Pemerintah daerah tetap diharapkan untuk selalu memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada masing-masing wilayah, serta disarankan untuk melakukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi pasokan dan mengendalikan harga.



9. Perkembangan pelaksanaan GPM Pusat dan daerah sampai dengan Maret 2025

Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Pelaksanaan GPM Bulan Maret 2025 telah dilaksanakan sebanyak 1.731 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 31 kali, provinsi sebanyak 306 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 1394 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Maret 2025 sebanyak 2.635 kali dengan rincian Pusat sebanyak 46 kali, Provinsi sebanyak 418 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 2.171 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

10. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 (terlampir), maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP.

Sehubungan hal tersebut dilakukan penyaluran Beras SPHP di seluruh Indonesia (Zona I, II dan III) dengan target penyaluran sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton di Tingkat Konsumen mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Pelaksanaan penyaluran Beras SPHP sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025. Total penyaluran update 30 Maret 2025 sebanyak 80.218.285 atau 53,48%.

11. Kunker dalam rangka OPPM

OP Pangan Murah bertempat di Kantor Pos Kota Bogor dan di kantor pos Cibinong (27 Februari 2025) yang dihadiri: PT. PPI, PT. Berdikari, PT. RNI, TNI/POLRI, Pimpinan Kantor Pos, ID. Food, Kadis DKPP Prov Jabar, DKPP Kota Bogor.

Kunker hari ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan presiden RI. OP Pangan Murah dilaksanakan selama satu bulan di kantor pos yang tempatnya strategis di jalan2 utama.

PT POS akan menjadi outlet permanen untuk menyediakan bahan pangan murah (target pemerintah minimal 10% dari proses bisnis yang ada dikelola oleh pemerintah).

2.



12. Rakor Kegiatan GPM dan Kios Pangan Periode HBKN Puasa-Idulfitri 2025 dan Penandatanganan PKS NFA dengan Mitra Badan Pangan

Dalam rangka optimalisasi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kios Pangan khususnya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa-Idulfitri 2025 serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pinsar Indonesia, CV. Sedulur Papat, dan PT. Bagus Multi Karya Nusantara dengan Badan Pangan Nasional.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan antara Badan Pangan Nasional dengan Bank BRI, Pinsar Indonesia, CV. Sedulur Papat, dan PT. Bagus Multikarya Nusantara. PKS dilaksanakan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Kios Pangan. Dengan adanya PKS tersebut diharapkan Mitra dapat bekerjasama dengan Dinas di daerah.

Grand Event Organizer memberikan masukan perlunya dilakukan monitoring pemantauan harga pangan di pasar dekat lokasi GPM sebelum dilaksanakannya GPM karena adanya aduan masyarakat bahwa harga di pasar lebih murah dibandingkan di lokasi GPM.



13. Operasi Pangan Murah menjelang Puasa dan Idul Fitri

Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Pangan Murah menjelang Puasa dan Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden RI terkait penurunan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025.

Waktu pelaksanaan OP Pangan Murah dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 (H-3 Idul Fitri 2025), dengan waktu pelayanan sekitar jam 08.00 s/d 11.00 waktu setempat.

Lokasi pelaksanaan OP Pangan Murah di Kantor PT Pos Indonesia (Gerai AgriPost) di seluruh wilayah Indonesia (sekitar 4.500 kantor), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebanyak 88 UPT (63 UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), 23 UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP), dan 2 UPT Direktorat Jenderal Perkebunan) dan/atau lokasi lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Selain OP Pangan Murah di Kantor PT Pos Indonesia (Gerai AgriPost) dan UPTD Kementerian Pertanian, dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, juga dilakukan OP Pangan Murah khususnya daging ayam ras beku oleh pihak swasta/perusahaan yang tersebar di beberapa provinsi.

Lembaga yang melaksanakan OP Pangan Murah selama HBKN Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025 khususnya untuk 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu PT Pos Indonesia dan UPT Kementerian Pertanian dan/atau lembaga lain yang ditetapkan. Selain itu, OP Pangan Murah juga dapat dilakukan oleh penyedia/penyuplai bahan pangan lainnya seperti perusahaan/swasta untuk daging ayam ras beku, Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) untuk bawang merah, Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) untuk aneka cabai, Pinsar Indonesia (PI) dan Pinsar Petelur Nasional (PPN) untuk telur ayam ras, dan/atau pelaku usaha pangan lainnya. Hasil pelaksanaan OPPM seperti terlihat pada gambar 16.

14. GPM Kemensos

GPM merupakan usulan dari Kementerian sosial melalui Dharma Wanita Pusat Kementerian Sosial bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional. GPM dibuka oleh Ibu Menteri Sosial, (Ibu Fatma Saifullah Yusuf), didampingi oleh Ibu Wakil Mensos (Ibu Intan Agus Jabo Priyono) dan Ketua DWP Kementerian Sosial RI (Ibu Veronica Robben Rico) dan dihadiri oleh Perwakilan pejabat Tinggi Madya dan Pratama Lingkup Kementerian Sosial, ASN Kementerian Sosial RI, pegawai Gol 1 dan 2, honorer, PNPN, PPPK dan Perwakilan dari Dit SPHP Badan Pangan Nasional.

Terdapat 18 stand dan vendor yang berpartisipasi dalam kegiatan GPM diantaranya (Perum BULOG, ID FOOD [PT RNI, PT PPI, PT Berdikari), SAHARA (Sahabat Usaha Rakyat), WINGS FOOD, PD Dharma Jaya, PT CPI, Aslupama, PT BMN, Alfresh, Aisyah Kitchen, AMI, Yuana Food, kios pangan wargosnu, aspartan, dan Hataki.

Harga GPM: Beras SPHP Rp 60.000/5kg, beras medium Rp 62.500/5kg; gula Rp 17.000/kg; Cabai merah keriting Rp 25.000/0,5kg; bawang putih Rp 20.000/0,5kg; cabai rawit merah Rp 40.000/0,5kg; bawang merah Rp 30.000/kg; daging sapi Rp 89.000/kg; daging ayam Rp 34.000/kg; telur ayam Rp 28.000/kg; terigu Rp 8.000/kg, dan minyakita Rp 15.700/lit. Selain produk sembako dijual juga produk berbagai sayuran dengan harga Rp 5.000/pack dan pangan lokal dengan harga variatif dengan data omset terlampir.

Kebutuhan pangan yang disiapkan diperuntukkan pengunjung/konsumen sekitar 2.000 orang. Direncanakan pada waktu dekat akan dilakukan bazar pangan murah di 32 upt Kementerian Sosial RI Provinsi.



15. GPM Yayasan Balarenik

Gerakan Pangan Murah Yayasan Balarenik dilaksanakan di Rumah Singgah Yayasan Balarenik Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi pada tanggal 12 Maret 2025. GPM dibuka oleh Anggota DPR RI Komisi 4, dan dihadiri oleh Kepala Bidang DKP3 Kota Bekasi, Ketua Yayasan Balarenik, PKK lingkup kelurahan Bintara dan Tim SPHP.

Lokasi GPM berada di pemukiman padat penduduk dengan mata pencaharian mayoritas warga yaitu memanfaatkan barang bekas untuk dijual kembali (penjual rongsok). Pengunjung yang datang cukup ramai. Bahan pangan yang paling diminati yaitu minyak goreng, telur, dan produk olahan. Mitra yang ikut serta antara lain Perum BULOG, RNI, PPI, CPI, PT BMN, Egg baik, SNJ, dan UMKM dengan total omset sementara yang sudah melaporkan sebesar Rp 9.498.900.

16. GPM DKM Adz-Dzikri

Gerakan Pangan Murah DKM Adz-Dzikri Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, 9 Maret 2025. GPM dibuka oleh Wakil Walikota Kota Depok, dan dihadiri oleh Camat Sukmajaya, Pokja Korkes Stabilisasi Pasokan, Ketua DKM Adz-Dzikri, dan Tim SPHP.

Mitra yang ikut serta dalam GPM DKM Adz-Dzikri antara lain Perum BULOG, RNI, CPI, AACI, Agrobhakti Jaya, Pastan Pusat, Aslupama, AACI, Hataki, Pinsar Indonesia, dan Kedai Tani. Total omset sementara GPM DKM Adz-Dzikri sebesar Rp 45.432.500.

17. GPM TVRI

Gerakan Pangan Murah (GPM) kerjasama dengan LPP TVRI Pusat yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Maret 2025 di Kantor LPP TVRI Pusat. Kegiatan GPM

diselenggarakan serentak di LPP TVRI Jakarta dan 21 TVRI Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memberikan kemudahan akses pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi Masyarakat terutama karyawan di LPP TVRI.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapanas dan Dirut TVRI, dan dihadiri oleh Deputi I KSP, Jajaran Dewas LPP TVRI, Jajaran Direksi LPP TVRI, Direktur PPSKMP Bapanas, kepala SPI LPP TVRI, Kepala Pusdiklat LPP TVRI, Kepala Stasiun DKI Jakarta, Staff Bapanas dan LPP TVRI.

GPM menyediakan 20 stand bahan pangan dengan melibatkan 20 mitra vendor Badan Pangan Nasional penyedia bahan pangan, diantaranya: Perum Bulog, CPI/(prima freshmart), Pinsar Indonesia, Aslupama, Alfresh, Hataki, Toko Daging Nusantara (SNJ), Kedai Tani. PT BMN, Wargosnu, Food stations, dan Dharma Jaya. Selain itu juga melibatkan 5 UMKM Binaan Bapanas diantaranya UMKM AMI, UMKM Yuana Food, UMKM Aisyah Kitchen, UMKM Aspami, UMKM Niharchaniago.

Komoditas pangan yang dijual pada GPM adalah pangan pokok strategis seperti beras, gula konsumsi, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, aneka cabai dan bawang, serta sayur, buah dan aneka pangan olahan lainnya.

18. GPM Mabes TNI

Gerakan Pangan Murah (GPM) PMPP TNI di Komplek IPSC Sentul pada hari Senin, 17 Maret 2025. GPM dibuka oleh Komandan PMPP TNI, dan dihadiri oleh Direktur SPHP, Wakil Komandan PMPP TNI, Direktur lingkup PMPP TNI, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bogor, anggota PMPP dan ibu-ibu persit, Kepala Desa Tangkil, Kepala Desa Hambalang, Kepala Desa Sukahati dan Kepala Desa Leuwinutug, Tim SPHP dan masyarakat sekitar.

Lokasi GPM berada di Komplek PMPP TNI dan Perkantoran. Pengunjung yang datang ramai dg estimasi sekitar 2.500 orang dan animo masyarakat untuk membeli tinggi karena harga komoditas yang lebih murah dibanding harga pasar dan adanya Voucher (senilai Rp 50.000/ konsumen dalam pecahan 5000 dan 10.000) yang dibagikan pihak PMPP guna membantu masyarakat. Meskipun kondisi di lapang sempat terjadi hujan, namun tidak mengurangi animo masyarakat untuk antri dan membeli.

Mitra yang ikut serta antara lain Perum BULOG, RNI, PPI, CPI, PT SNJ, Aslupama, Alfresh dan DKP Kab. Bogor. Komoditas yang dijual meliputi beras sphp, beras premium, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, daging sapi, daging kerbau, bawang merah, bawang putih, aneka cabai, aneka sayur dan aneka buah serta produk olahan.

19. GPM Serentak Prov Sulawesi Tenggara

Launching GPM dilaksanakan di Ex MTQ Kendari, dibuka oleh Wakil Gubernur Sultra, dihadiri oleh Direktur SPHP, OPD Sultra, BI, dan secara online oleh Bupati/Walikota

dan OPD terkait se-kab/kota di Sultra. GPM dilaksanakan secara serentak di 17 Kab/Kota selama 3 hari (19 - 21 Maret). GPM dirangkaikan dengan kegiatan GPM TVRI serta ada dukungan dr BI untuk penyediaan tenda.

Kegiatan GPM serentak ini merupakan salah satu upaya pemerintah prov Sultra untuk memberikan akses pangan murah berkualitas kepada masyarakat pada periode HBKN Puasa Idul Fitri sekaligus upaya pengendalian inflasi. Implementasi program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.

Terdapat sekitar 18 vendor yang berpartisipasi di launching GPM. Komoditas pangan yg dijual antara lain: Beras SPHP: Rp 58.000/5kg, Beras Premium: Rp 71.000 - 73.000/5kg, Bamer: Rp 35.000/kg, Baput: Rp 45.000/kg, Telur Ayam Ras: Rp 53.000/rak, Gula: Rp17.500/kg, Minyakita: Rp 15.000/l, Minyak Premium: Rp 18.000/l, selain itu juga tersedia Gas LPG dg harga Rp 20.000/tbg, produk UMKM, serta layanan penukaran uang oleh BI.

20. GPM serentak Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan GPM Serentak Provinsi Jawa Tengah Kamis, 20 Maret 2025 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan GPM Serentak dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Mijen Kota Semarang, dibuka oleh Menko Pangan, Mendag, Ka Bapanas, Deputi Kepala BI Prov Jateng, Asisten ekonomi dan pembangunan Sekda Jateng dan dihadiri oleh Wali Kota Semarang, Kadis DKP Prov Jateng dan Kota Semarang, OPD Jateng, BI Jateng, Tim Bapanas, dan Pinwil Bulog Jateng kemudian secara online oleh Bupati/Walikota dan OPD terkait se-Kab/Kota di Jateng. Kegiatan GPM dilaksanakan secara serentak di 35 Kab/Kota.

Kegiatan GPM serentak telah menyalurkan komoditas pangan strategis lebih dari 180 ton. Antara lain: 114.55 ton Beras (10 ton Premium; 50.75 ton medium; 53.70 ton SPHP), 18.186 liter minyak goreng (4.514 premium, 13.672 minyakita), 16,15 ton telur ayam ras, 10,53 ton gula pasir, 3,63 ton daging ayam ras, 3,63 ton aneka cabai 4,20 ton bawang merah, serta komoditas pangan lainnya.

Terdapat sekitar 39 vendor yang berpartisipasi di Kegiatan GPM serentak Komoditas pangan yg dijual antara lain: Beras Premium: 70.000/5Kg, Beras Medium: Rp 58.000/Kg, Beras SPHP: Rp 60.000/5kg, Bamer: Rp35.000/kg, Baput: Rp 32.000/Kg, Telur Ayam Ras: Rp 24.000/Kg, Gula: 16.500Rp/Kg, Minyakita: Rp 14.000/l, Minyak Premium: Rp17.100/l, Selain itu juga tersedia aneka sayur dan buah serta produk umkm binaan OPD Prov Jateng dan Kota Semarang.

21. GPM bersama Asosiasi Pasar Tani Kementan

Gerakan Pangan Murah bersama Asosiasi Pasar Tani Kementan pada Kamis, 20 Maret 2025. Bazar Ramadhan dibuka oleh Kepala BPOM, dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II BPOM, perwakilan Direktorat STO Kementan, Ketua Asosiasi Pasar Tani, perwakilan Badan Pangan Nasional, serta para pegawai lingkup BPOM.

Mitra yang berpartisipasi di Bazar Ramadhan terdiri dari mitra DWP BPOM, mitra Aspartan, serta mitra Badan Pangan Nasional. Bazar Ramadhan diselenggarakan 2 hari pada Kamis-Jumat, 20-21 Maret 2025.

22. GPM bersama Ditjen BPD Kemendagri

GPM dilaksanakan dalam rangka kegiatan Bazar Ramadhan DWP Ditjen Bina Pemdes. GPM dikunjungi oleh Ibu Dirjen Bina Pemdes dan jajarannya. GPM melibatkan beberapa vendor diantaranya vendor Bapanas 7 mitra, vendor UMKM dan vendor fashion mitra DWP Kemendagri. Vendor pangan menjual beras SPHP, beras premium, telur ayam ras, telur omega, daging ayam beku, daging sapi beku, minyak goreng curah, CRM, CMK dan minyak kita

Mitra Bapanas yang mengikuti GPM Kemendagri diantaranya Perum BULOG, Food Station, Nourma Farm, CPI, SNJ dan CV Sedulur Papat.

23. GPM Kerapatan Indonesia Tanah Air

Kegiatan GPM Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) merupakan kolaborasi kegiatan antara Badan Pangan Nasional dengan KITA yang diselenggarakan di daerah Kemiri, Kabupaten Tangerang. Acara dimulai pukul 13.00 s/d 17.00 WIB dan dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur SPHP, Perwakilan Mabes POLRI, Perwakilan dari TNI AD, dan Camat Kemiri. Selain acara GPM juga dilaksanakan santunan kepada anak yatim dan dhuafa berupa uang dan beras oleh KITA.

Kegiatan GPM melibatkan 12 mitra vendor Badan Pangan Nasional dengan komoditas pangan pokok yang dijual diantaranya adalah Beras SPHP, Beras Premium, Minyakita, Minyak Goreng Kemasan Premium, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Kerbau, , Gula Konsumsi, CMK, CMB, CRM, Bawang Merah, dan Bawang Putih, selain itu juga dijual aneka sayur, aneka olahan ayam, aneka olahan ikan serta hampers untuk persiapan menyambut idul fitri 2025, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap kegiatan GPM mengingat daerah tersebut mata pencaharian masyarakat kebanyakan buruh. Komoditas yang paling banyak diminati adalah Beras SPHP Rp11.500/kg terjual habis sejumlah 1 ton, Minyakita Rp15.700/l terjual sejumlah 120 liter, Daging Kerbau Rp97.000/kg terjual habis sejumlah 30 kg, dan Telur Rp25.000/kg terjual 32 kg. Total omset yang dihasilkan dari kegiatan GPM di Kemiri Kab. Tangerang sejumlah Rp23.860.900.

24. GPM bersama Trubus

GPM Kampung Ngabuburit Trubus Grup yang diselenggarakan Wisma Hijau Cimanggis Kota Depok pada 22 Maret 2025. Kegiatan GPM diselenggarakan oleh Bapanas berkolaborasi dengan Trubus Grup yang dimulai pukul 14.00-selesai dan dihadiri oleh Direktur SPHP, pimpinan Trubus Grup dan tim SPHP Bapanas.

Kegiatan GPM melibatkan 14 mitra vendor Badan Pangan Nasional yang menyediakan bahan pangan dan pangan olahan, 6 mitra UMKM binaan Trubus yang menyediakan olahan pangan lokal serta Toko Trubus yang menyediakan buah-buahan, bibit dan pupuk.

25. GPM bersama Kadin

GPM Kolaborasi Bapanas dan KADIN Indonesia dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada 22 Maret 2025. GPM dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional didampingi Sestama Bapanas dan Direktur SPHP Bapanas beserta jajarannya, Walikota Bekasi beserta jajarannya, Ketua Umum KADIN Indonesia didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Pangan dan Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan beserta jajarannya, Forkopimda Kota Bekasi, dan masyarakat umum. Kegiatan GPM dalam rangka memfasilitasi bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat serta untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan selama bulan Ramadhan.

Mitra yang ikut serta dalam GPM terdiri dari 7 Mitra yaitu Perum BULOG, PT. RNI, PT. CPI (Prima Freshmart), PT. SNJ (Toko Daging Nusantara), PT. BMN dan Wargosnu, CV. Alfresh, dan LPER - Teluria. Total omzet GPM Rp 27.043.100. Komoditas pangan yang dijual pada GPM adalah pangan pokok strategis seperti beras, gula konsumsi, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, aneka cabai dan bawang, serta aneka pangan olahan lainnya.

26. GPM bersama DKM Al Husna

GPM diselenggarakan dalam rangka penutupan pesantren kilat yang telah diikuti 112 anak putra dan putri serta pemberian santunan kepada Yatim piatu se-RW 05 kampung banjaran pucung yang berjumlah 66 anak. Acara dihadiri oleh Perwakilan Plt. Camat Tapos, Lurah Kelurahan Cilangkap, Pembina DKM Al Husna, Ketua RW 05 Kelurahan Cilangkap dan Perwakilan Direktorat SPHP Bapanas.

Acara GPM dihadiri oleh mitra yang berpartisipasi dalam GPM antara lain: Perum BULOG, PT. RNI, PT. PPI, PT. CPI, PT. SNJ, CV. Alfresh, PINSAR Indonesia, Agrobakti Jaya dan UMKM Pangan olahan lainnya.

Komoditas pangan yang dijual pada GPM adalah pangan pokok strategis seperti beras, gula konsumsi, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, aneka cabai dan bawang, serta aneka pangan olahan lainnya.

27. GPM bersama Yayasan Bendera Peduli Masyarakat

Kegiatan GPM kerjasama dengan Yayasan Bendera Peduli Masyarakat dihadiri oleh Direktur SPHP, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bendera Peduli Masyarakat, Perwakilan SPHP dan jajaran pengurus Yayasan Bendera Peduli Masyarakat. GPM

ini dilaksanakan dalam aksi Yayasan Bendera Peduli Masyarakat untuk membantu Masyarakat sekitar untuk mendapatkan sembako pangan murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025

Beberapa Vendor yang mengikuti GPM ini diantaranya Padasuka, Pinsar, Hataki, Ananda Food, Pronas, Finna food, burayot, telur asin Surabaya, sunpride dendeng Latifah dan vinny baso tahu. Komoditas yang dijualnya diantaranya Beras SPHP, Beras Premium, Sayuran, Telur, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Daging. Adapun omzet kegiatan tersebut terlampir. Antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk membeli komoditas pangan sehingga antrian tidak dapat dihindari. Masyarakat sangat terbantu dengan program Badan Pangan Nasional ini dan mengharapkan dapat digelar kembali.

28. GPM bersama Komisi II DPRD Jawa Barat

Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Cingcin Permata Indah Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Kegiatan GPM yang dilaksanakan dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. GPM dihadiri oleh Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. Saeful Bachri, Sekretaris DKPP Kabupaten Bandung, perwakilan kecamatan dan RW setempat. Vendor yang ikut dalam GPM ini Perwakilan Bulog, Vendor nya Asosiasi Usaha Pangan Masyarakat Kaupaten Bandung, Kios Unggas, Hataki, Poktan Sayuran Ciwidey dan UMKM. Komoditas pangan yang dijual di antaranya beras SPHP Rp 58.000/5 kg, beras premium Rp 65.000/kg, terigu Rp 10.000/kg, minyak goreng masku Rp 37.000/2 liter, minyak kita Rp 16.000/1 liter, gula pasir Rp 16.500/kg, bawang puting Rp 20.000/pack, bawang merah Rp 10.000/pack, aneka sayuran dan cabe serba Rp 5.000-Rp 10.000, telur Rp 25.000/kg, daging ayam Rp 32.000/ekor, daging sapi segar Rp 70.000/500 gr.

29. GPM Bersama Dewan Pimpinan Pusat Garda Muda Palapa

Kegiatan GPM Bapanas bekerjasama dengan Garuda Muda Palapa Senin, 24 Maret 2025 di Lapangan Bulutangkis Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Bogor. GPM dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memberikan kemudahan akses pangan yg berkualitas dengan harga terjangkau serta membantu masyarakat untuk mempersiapkan bahan pangan menyambut bulan Idul Fitri 1446 H.

GPM menyediakan 15 stand bahan pangan dan melibatkan 15 mitra vendor Badan Pangan Nasional diantaranya: Perum BULOG, Id food, CPI, Pinsar, PT. SNJ, Aslupama, BMN, Poktan Banjarsari, Lapak Buah Sriyono dan; UMKM mitra Bapanas dan Pabuaran.

Komoditas pangan yang dijual diantaranya: Beras SPHP: Rp 12.000/kg, Beras Premium: Rp 14.400/kg, Telur ayam ras: Rp 25.000/kg, Gula konsumsi: Rp 17.500/kg. Minyak Premium: Rp 21.000/kg, Daging ayam ras: Rp 30.000/kg, Daging sapi: Rp 110.000/kg, Daging kerbau: Rp 75.000/kg, Bawang Merah: Rp 22.500/0.5kg, Bawang Putih: Rp 25.000/0.5kg, CRM: Rp. 10.000/pack dan CMK: Rp 10.000/pack.

30. GPM Bersama Koperasi JPKP

GPM dilaksanakan pada Senin 24 Maret 2025 bertempat di Jalan Komplek Polri No.20 12, RT.11/RW.4/ Jl. Raya Bogor No.Km.5 yang dihadiri: Menteri Koperasi RI, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan Bagian Pangan, Walikota Jakarta Timur, Perwakilan Badan Pertahanan Nasional, Tim SPHP, Perwakilan Danjen Kopassus, Perwakilan ID FOOD, perwakilan PIHC, Perwakilan REKIND, Camat Ciracas, Ketua Dewan Pembina Ar-Risalah, dan Ketua Umum Yayasan Ar-Risalah.

Mitra vendor GPM yang bergabung dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan GPM GPM Ar-Risalah Ciracas antara lain: Bulog, Dharma jaya, CPI (ayam utuh 100 kg), Kedai Tani, PT. Food Station. Pasar Tani, RNI, Hataki, Agrobakti Jaya, Kedai Umi Firza/ olahan daging ayam, bandeng tulang lunak, Jusdoong, ASPAMI, Yuana Food, AMI, Kementrian ATR/BPN RI, Seni budaya, Seni budaya, UMKM JPKP, UMKM Ar Risalah, UMKM Ar risalah, Alfresh.

Komoditas yang paling diminati gula konsumsi dan minyak goreng, aneka sayuran HATAKI dengan kemasan Rp 5.000 sangat diminati selain kemasan yang menarik juga relatif murah.

31. GPM Bersama Rusun Cakung

Kegiatan Gerakan Pangan Murah diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan Pengurus RT 13 RW 08 Rusunawa Cakung Barat. GPM dimulai pukul 08.30-12.00 WIB dan dihadiri oleh Camat Cakung, Lurah Cakung Barat, Kepala Dinas PUPR, Pimpinan Cabang Bank DKI Tanjung Priok, Asisten Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur, Kapolsek Cakung, Satgas Pangan Kecamatan Cakung, tim SPHP Bapanas, serta warga di sekitar Rusunawa.

Kegiatan GPM melibatkan 7 mitra vendor Badan Pangan Nasional, dan 1 mitra undangan panitia yang menyediakan bahan pangan dan pangan olahan diantaranya Perum Bulog, ID Food, PT. Food Station, PD. Dharma Jaya, PD. Pasar Jaya, CPI (Prima Freshmart), Pinsar Petelur Nasional, dan Alfresh Gedong.

Komoditas pangan yang dijual pada GPM adalah pangan pokok strategis seperti beras, gula konsumsi, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, aneka cabai dan bawang, serta sayur, buah dan aneka pangan olahan lainnya.

32. GPM bekerjasama dengan Mabes TNI

Gerakan Pangan Murah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 25 Maret 2025. Kegiatan GPM dibuka oleh Panglima TNI, dan dihadiri oleh TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara, dan Tim SPHP. Disiapkan sebanyak 200 stand yang terlibat dalam Bazar Ramadhan yang terdiri dari Stand TNI AL, TNI AU, TNI AD, UMKM Binaan Mabes TNI, dan Mitra Bapanas. Mitra Bapanas yang ikut serta dalam GPM Mabes TNI antara lain Perum BULOG, CPI, Dharmajaya, dan Food Station.

33. GPM Bersama Komisi C DPRD Kota Depok

Gerakan Pangan Murah Badan Pangan Nasional dan DPRD Kota Depok di Kelurahan Kalimulya, Kec. Cilodong Kota Depok, 26 Maret 2025 GPM dibuka oleh Anggota DPRD Komisi C, dan dihadiri oleh Lurah Kalimulya, Ketua LPM, Ketua RW lingkup Kelurahan Kalimulya dan Tim SPHP.

Lokasi GPM berada di pemukiman padat penduduk. Pengunjung yang datang cukup ramai. Bahan pangan yang paling diminati yaitu minyak goreng, telur, dan produk olahan. Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu rangkaian dengan sosialisasi tugas dan wewenang Komisi C DPRD Kota Depok dan simbolis pemberian paket sembako bagi duafa. Mitra yang ikut serta antara lain Perum BULOG, RNI, CPI, PT BMN, Pinsar Indonesia, SNJ, Kedai Tani dan UMKM.

34. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 40.000kg untuk komoditas beras. Rincian kegiatan FDP Maret 2025. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sudah terealisasi sebanyak 65.225 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 64.655 kg.

35. Kios pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Perkembangan Kios pangan per 31 Maret 2025 sebanyak 486 Kios Pangan yang tersebar di 32 Provinsi dan 108 Kabupaten/Kota.

c). Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan Maret 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan berupa Kajian Evaluasi Pengadaan Gabah dan Beras oleh Perum Bulog untuk CPP. Kajian ini disusun sebagai upaya mendapatkan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengadaan GKP dan Beras setelah adanya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025. Sedangkan untuk penyusunan NSPK terdiri dari sebagai berikut:

- Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kepbadan 591 Jumlah CPP 2025;
- Rancangan Perbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan;
- Rancangan Revisi Perpres Perubahan 125/2022;
- Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional (Kemenko Ekon).

2. Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Gabah dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2025

Rapat koordinasi diselenggarakan secara tatap muka di Avenzel Hotel, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat tanggal 18 Maret 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan dihadiri oleh Kepala Divisi Pengadaan, Perum BULOG; Kepala Divisi Manajemen Mutu, Perum BULOG; Kepala Divisi Penganggaran, Perum BULOG; Dosen IPB University; dan Fungsional Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional. Adapun hasil rapat koordinasi sebagai berikut:

- Badan Pangan Nasional telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan gabah dan beras untuk CBP pada 10-14 Maret 2025 di Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Karawang, Kab. Pati, Kab. Bojonegoro, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, dan Kab. Tegal.
- Perum BULOG menyampaikan realisasi pengadaan gabah dan beras pertanggal 17 Maret 2025 sebesar 300 ribu ton atau sekitar 11% dari total 3 juta ton penugasan.
- Hasil evaluasi terhadap kebutuhan anggaran akan dituangkan pada kajian singkat.



3. Rapat Pembahasan Rperbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan

Rapat pembahasan RPerbadan Sistem Distribusi Pangan diselenggarakan secara hybrid di Hotel Avenzel Bekasi pada tanggal 18 Maret 2025, dipimpin oleh Direktur DCP, Bapanas dihadiri oleh Asdep Distribusi Pangan dan Asdep Logistik Pangan Kemenko Pangan dan pejabat fungsional lingkup Direktorat DCP. Amanat UU 18/2012 tentang Pangan Ps 46-49 berkaitan dengan tujuan distribusi pangan agar pangan dapat di distribusikan dengan merata dan aman. Distribusi pangan termasuk pada transportasi, bongkar muat, sarpras logistik pangan. Harapannya Perbadan tentang pengelolaan sistem distribusi pangan ini dapat dioperasionalkan/diaplikasikan di lapangan dan dilakukan pemantauan sistem pelaporannya. Tindak lanjut draft RPerbdan akan segera diperbaiki oleh tim Direktorat DCP untuk dapat dikirim ke Kemenko Pangan untuk dimintai masukan untuk penyusunan draft RPerbadan kembali



4. Rapat pembahasan kajian ketahanan pangan G20 di Afrika Selatan Tahun 2025

Rapat diselenggarakan pada tanggal 04 Maret 2025. Rapat dipimpin oleh Karo Perencanaan, Kerja Sama dan Humas dan dihadiri oleh perwakilan dari Dit Ketersediaan, Dit SPHP dan Dit DCP. Beberapa poin penting yang dibahas tentang Isu yang akan dibahas dalam agenda G20 adalah isu finance track dan sherpa track (non-finance). Untuk memperdalam kajian ketahanan pangan tersebut, panitia penyelenggara G20 telah mengirimkan Concept Note dg 4 poin studi yang diharapkan dapat mencakup keseluruhan berkaitan dg isu ketahanan pangan (re: harga pangan).

Hasil rapat memberikan concern terhadap konsep yang diajukan antara lain:

- kajian agar dapat mengakomodir isu trade barrier di negara kepulauan seperti Indonesia.
- mempermudah aksesibilitas sistem informasi terkait harga pangan secara global.
- sistem informasi pangan global sudah harus terkoneksi dengan negara-negara baik produsen maupun konsumen (konektivitas).

Working Team G20 akan mengadakan rapat pembahasan atas Concept Note yang ada secara online pada Rabu, 05 Maret 2025 pukul 17.00 WIB, dimana masing-masing perwakilan negara G20 akan diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan pandangannya.

5. Rapat Pembahasan entry meeting Reviu Kekurangan Pembayaran Penyaluran CPP Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2024. Rapat dilakukan secara hybrid yang dipimpin oleh Inspektur Bapanas dan di hadiri oleh Tim Reviu BPKP, Tim Reviu Inspektorat Bapanas, dan perwakilan Direktorat DCP. Reviu dimulai tanggal 11-27 Maret 2025 dan Konfirmasi & Klarifikasi bersama ID FOOD dan transpoter dijadwalkan setelah Lebaran Idul Fitri. Lingkup reviu terbatas pada kekurangan pembayaran penyaluran CPP bantuan pangan daging ayam dan telur ayam alokasi Januari Th 2024 sebesar Rp 139.111.453.879 dan alokasi Februari-Maret Th 2024 sebesar Rp 410.938.224. APIP telah mengupload dokumen yang diminta oleh BPKP dan siap untuk memenuhi apabila ada yang dibutuhkan.

6. Rapat Konfirmasi Pemeriksaan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bulog Atas Penyaluran Banpang 2023 -2024

Rapat dilaksanakan secara offline tgl 7-8 maret di Nusantara 1 dipimpin oleh ketua tim pemeriksa LK Bapanas dan dihadiri oleh panitia pengadaan transporter penyaluran banpang. Berita Acara Penetapan HPS oleh Direksi, Surat Penawaran dan Kontrak terdapat pernyataan "sudah termasuk PPh" dan tidak termasuk PPN, dan harga satuan adalah all in, hal ini bertentangan dengan aturan bahwasanya PPh adalah kewajiban penyedia. Bulog telah menjawab pertanyaan dari pemeriksaan dan dituangkan dalam BAW.

7. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bantuan pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tahun 2025 selama 2 (dua) bulan yaitu Januari-Februari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data PBP ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Cadangan Pangan Pemerintah Nomor PKS 03/SES/01/2025 dan Nomor : 01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK. Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor 083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya penundaan bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025; Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai tanggal 07 Februari 2025; Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP

beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya. Dengan demikian, penyaluran CPP untuk bantuan pangan tahun 2025 belum dilaksanakan hingga ditetapkan pada hasil rakortas berikutnya.

8. Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Pasal 23 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana tertuang dalam Perpres 66/2021. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres 125/2022. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum BULOG.

Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar 2.000.000 (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 27 Maret 2025 total pengadaan CBP sampai dengan Maret 2025 sejumlah 706.720 (tujuh ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh) ton. Pengadaan dari dalam negeri sebesar 636.320 (enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh) ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar 70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) ton.

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan Maret 2025 terdiri dari penyaluran Beras SPHP sebesar 171.236 ton, bencana dan keadaan darurat sebesar 128 ton, dan golongan anggaran sebesar 17.186 ton. Kegiatan penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan ditunda hingga hasil rakortas selanjutnya berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor: R- 83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 Tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Tanggal 31 Januari 2025. Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan

Maret, stok/persediaan CBP sebesar 2.249.446 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar 1.792.331 ton).

9. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Maret 2025 dengan total sebesar 6.802,82 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Pada bulan Maret, tidak ada provinsi yang melakukan pengadaan CBPD baru, sedangkan provinsi yang melakukan penyaluran ada 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat sebanyak 94,25 ton dan Jawa Tengah sebanyak 17,85 ton. Penyaluran secara rinci per provinsi bulan Januari-Maret 2025. Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per minggu ke III Maret 2025 dengan total sebesar 13.428,54 ton yang tersebar di 314 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Terdapat 3 kab/kota yang melakukan pengadaan CBPD pada bulan Maret dengan total sebanyak 64,6 ton yaitu Kota Gorontalo, Kota Surakarta, dan Kab Teluk Bintuni. Sedangkan wilayah kab/kota yang melakukan penyaluran terdiri dari 15 kab/kota.

10. Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal dengan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertahan dan mengakar di masyarakat diantaranya adalah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Kegiatan penguatan LPM terdiri dari pemantauan data dan lokasi LPM melalui website aplikasi Sigap Nasional dan Kajian Klasifikasi LPM. Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025. Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik saat ini baru dimulai bulan Maret dengan penyelesaian revisi Rencana Pengeluaran Dana (RPD) bagi pemda kab/kota yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM. Selanjutnya pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output kegiatan DAK akan dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi eSAKIP. Saat ini aplikasi sedang dalam tahap finalisasi pengembangan dan akan disosialisasikan kepada seluruh user kabupaten/kota penerima DAK pada Bulan April 2025. Berikut terlampir sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025.

11. Penguatan Sarana Prasarana Logistik Pangan

Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan. Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu.

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional. Pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan.

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan MARET Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) KRO dan 6 output/RO berdasarkan pembagian dari masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.921.079.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sejalan dengan perkembangan anggaran, terjadi revisi anggaran pada DIPA akibat adanya alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sehingga anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjadi Rp57.433.780.000,-.
2. Berdasarkan pemantauan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan posisi tanggal 31 MARET 2025, realisasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp2.785.646.870,- atau 4,85% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp57.433.780.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari rencana penarikan bulan MARET 2025, yaitu sebesar Rp2.100.344.000,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi karena adanya alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga mempengaruhi terhadap capaian realisasi. Selain itu, belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan perencanaan kegiatan tidak terjadwal secara rutin. Dengan demikian realisasi tersebut masih jauh dari target serapan anggaran sebesar 10% dari pagu anggaran.
3. Pada bulan Maret terdapat penambahan realisasi fisik dengan rincian, yaitu 6 RO Rekomendasi, 3 RO Koordinasi, 5 RO NSPK, Pangan Terdistribusi 15 Kelompok Masyarakat, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 2 RO Data dan Informasi. Rendah serapan anggaran perlu menjadi perhatian untuk perencanaan keuangan di masing-masing RO di bulan selanjutnya.

IV.2. Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan MARET Tahun 2025 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Namun capaian kinerja realisasi keuangan dan fisik pada bulan tersebut belum dapat maksimal, hal ini disebabkan karena :

1. Terdapat kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan dan persiapan kegiatan.
2. Pembayaran honor petugas enumerator harga mengalami kendala karena ada perubahan mekanisme pembayaran.
3. Belum tersedianya anggaran sebagai dampak instruksi untuk penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Meeting serta Efisiensi Belanja K/L secara keseluruhan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baik di Pusat maupun di Daerah.
4. Masih terdapat revisi untuk efisiensi belanja dan penyesuaian anggaran lingkup Badan Pangan Nasional, sehingga menghambat pelaksanaan persiapan pelaksanaan kegiatan.
5. Belum ada kejelasan untuk menyelenggarakan kembali Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah baik melalui Bantuan Pangan maupun kegiatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) di Tahun 2025.
6. Perencanaan kegiatan yang tidak terjadwal secara baik.

IV.3. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025 tetap berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan dan mempercepat pemenuhan dokumen pendukung realisasi periode bulan selanjutnya. Selain itu melakukan langkah strategi, antara lain:

1. melakukan penyusunan rencana penarikan anggaran baik melalui metode LS maupun TUP untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah secara rutin dan serta sosialisasi regulasi Perbadan

3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui koordinasi penyelesaian sisa pembayaran penyaluran Bantuan Pangan, penguatan pemantauan pelaksanaan DAK Non Fisik 2025, dan kegiatan lainnya lingkup DCP yang tidak termasuk dalam efisiensi Inpres.
4. Koordinasi secara intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan
5. Melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan.